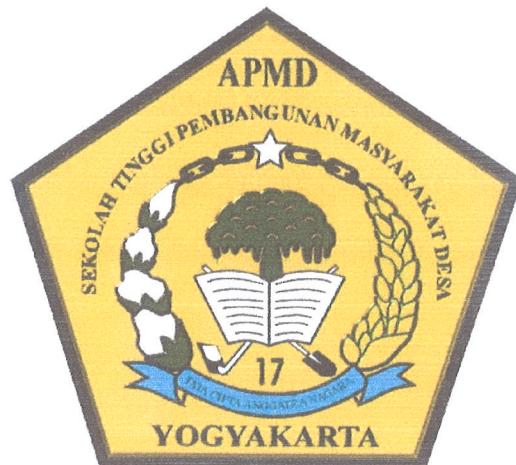


SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KELURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

(Studi Penelitian di Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh:

**UMBIAH HABAITA HALANG
20520075**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**



HALAMAN JUDUL

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI

KELURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN,

KABUPATEN BANTUL

(Studi Penelitian di Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Serjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

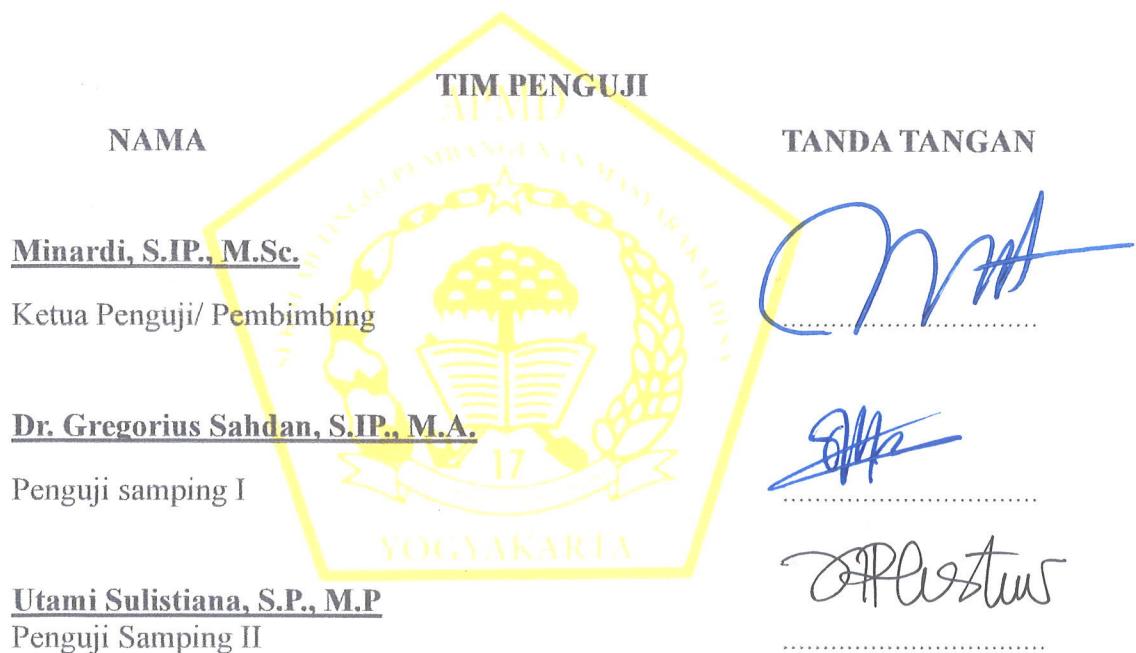
Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Pengaji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 July 2025

Jam : 11.00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

0511087301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umbu Ay Habaita Halang

NIM : 20520075

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**STRATEGI PEMERINTAH DESA**

DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH"

adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 July 2025

Yang membuat pernyataan



Umbu Ay Habaita Halang

20520075

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Umbu Ay Habaita Halang
NIM : 20520075
Telp : 082227016295
Email : umbu.ay99@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 July 2025
Yang membuat pernyataan



Umbu Ay Habaita Halang
20520075

MOTTO

**"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku."**

(Filipi 4:13)

**"Bukan dengan kekuatanku sendiri, tetapi oleh kasih karunia Tuhan
aku dapat menyelesaikan semuanya."**

**"Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang memampukan, dan Tuhan
yang menyelesaikan."**

**"Ilmu tanpa iman adalah kesombongan; iman tanpa tindakan adalah
kehampaan."**

**"Setiap halaman yang tertulis adalah bukti bahwa Tuhan berjalan
bersama dalam setiap proses."**

**"Pendidikan adalah anugerah, dan menyelesaiannya adalah bentuk
tanggung jawab atas panggilan Tuhan dalam hidupku."**

**"Saya percaya bahwa karya kecil ini, jika dikerjakan dengan setia,
berharga di mata Tuhan."**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmatnya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi, menyertai dan memberkati setiap napas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Ayah Yulianus Ndakularak dan Ibu Yuliana Ndungu Riamu mereka adalah sosok-sosok penting dalam kehidupan saya. Berkat doa dan dukungan mereka dalam berbagai aspek baik itu moril maupun materil, saya bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang dan bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, sehat selalu.
3. Kepada Kaka saya Apriani Rambu Djama, Adik saya Alfredo Ndakularak serta ponaan saya Ugil, UP dan kaka Bapa UP. Serta semua keluarga di rumah Opumehang Bapa Londung, tante Melda, Dora (mea), Linda, Lexy, Leo terima kasih sudah mendukung saya baik secara moril maupun material.
4. Kepada saudara-saudara Bapa saya, Bapa Tengah dan Mama tengah, Bapa Bonter dan Mama Anti, Bapa Umbu Anarara dan mama Kondamara, Bapa Apris dan Mama mondu, Bapa Londung, Bapa Merdon, dan semua anak-anak yang saya tidak bisa sebutkan nama-namanya, Terima kasih banyak-banyak atas dukungan Moral dan Material yang sudah di berikan kepada saya sampai saat ini, dan semua keluarga besar Kabihu Anamaharai yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya terima kasih sekali lagi.
5. Kepada Tante-tante saya di Lumbukokur dan di Lewa dan tante Laki-laki serta semua anak-anak, kaka Umbu, Nety, Adi Ensi, adik saya Putra (almarhum) , Risky, UP, dan bapa Dede, Terima kasih banyak atas dukungan moril dan materil yang sudah di berikan kepada saya sampai saat ini, sehat selalu.
6. Teman-teman saya di tanah rantau Umbu Nanda, Try merang, kaka Kraton, kaka Rian, Noldi, Umbu Ardo, Era, alvin, Umbu Kalendi, Ary

Dondu, Alvin Tobu, James, Edo, Josua, Fisal, Agus, Nduyo Boming, kaka Rusdy, kaka Reksi dan semua sepupu-sepupu saya di Jogja, Umbu Tanda (UT) , Umbu Valen, Adi Ensi, Adi Ambu dan masih banyak lagi. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat dan saudara selama di tanah rantau.

7. Saudara-saudara, Kakak-kakak, dan Adik-adik di organisasi tercinta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Yogyakarta, Terima kasih karena GMKI telah menjadi ruang yang nyata bagi saya untuk bertumbuh. Di sinilah saya belajar menghadapi tantangan, mengelola emosi, memperkuat mental, dan membentuk kedewasaan diri. Lewat setiap proses baik dalam ibadah, diskusi, aksi, maupun pelayanan saya dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan melayani dengan hati dan bertanggung jawab di tengah gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat.
8. Dan semua teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mewarnai masa perkuliahan dan ikut serta menanyakan progres selama menulis skripsi apabila bertemu dengan saya di kampus, dan juga ikut memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”** Sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang sudah mendukung selesainya penulisan skripsi ini dengan baik. Maka dengan besar hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dan sebagai penguji 1
4. Bapak Minardi, S.IP., M.Sc, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Utami Sulistiana, S.P .,M.P sebagai penguji 2
6. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
7. Seluruh staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
8. Pemerintah Kalurahan Triwidadi, serta semua Masyarakat Triwidadi sebagai tempat penelitian , dan juga ikut membantu penulis untuk memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis akan selalu terbuka dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, sehingga akan menjadi pelajaran bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, 29 July 2025

Umbu Ay Habaita Halang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Literatur Riview	8
G. Kerangka Konsep Penelitian.....	15
1. Pemerintah dan Pemerintahan	15
2. Pemerintah Kalurahan/Desa	16
3. Pengertian Strategi.....	22
4. Pemberdayaan.....	23
5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	27
H. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Objek Penelitian	32
3. Subjek Penelitian.....	32

4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
5. Teknik Analisis Data.....	35
BAB II PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	37
A. Kondisi Kelurahan	37
1. Sejarah Kalurahan Triwidadi	37
2. Keadaan Geografis	39
3. Keadaan Demografi.....	43
4. Keadaan Sosial dan Ekonomi	50
5. Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Infrastruktur Umum	53
6. Profil UMKM Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul	61
7. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi.....	63
BAB III STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	67
A. Arah Tujuan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan UMKM.....	67
B. Proses Evaluasi dan Pembelajaran Strategi UMKM di tingkat Desa	71
C. Kebijakan dan Arahan Strategis Desa dalam Pengembangan UMKM	75
D. Bentuk Nyata Program dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM.....	81
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi UMKM.....	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian	32
Tabel 2 Kepala Desa/Lurah Yang Pernah Menjabat Di Kalurahan Triwidadi.....	39
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	44
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	46
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 7 Jumlah Sarana Prasarana Umum.....	54
Tabel 8 Jumlah Fasilitas Pendidikan	56
Tabel 9 Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	58
Tabel 10 Jumlah Fasilitas Peribadahan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi..... 63

INTISARI

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi penting dalam penguatan ekonomi lokal di tingkat desa. Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, terutama pada produk olahan pangan, kuliner, dan kerajinan lokal. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan literasi digital, akses pasar yang terbatas, dan minimnya pendampingan berkelanjutan masih menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Triwidadi dengan menggunakan pendekatan lima indikator strategi menurut Geoff Mulgan, yakni: tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Metode yang digunakan adalah pendekatan Eksploratif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tujuan: Pemerintah desa memiliki komitmen jelas untuk mendorong kemandirian ekonomi warga melalui pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan; (2) Lingkungan: Potensi lokal cukup kuat, namun tantangan digitalisasi dan keterbatasan akses pasar menjadi hambatan utama; (3) Pengarahan: Pemerintah Kalurahan melakukan pengarahan melalui penguatan kelembagaan seperti Desa Preneur dan pelibatan warga dalam musyawarah perencanaan program; (4) Tindakan: Berbagai pelatihan dan pendampingan telah dilaksanakan, termasuk pelatihan pengemasan, digital marketing, dan fasilitasi promosi produk melalui expo desa; (5) Pembelajaran: Evaluasi dilakukan melalui refleksi program, namun masih diperlukan peningkatan sistem pendataan dan monitoring berbasis data.

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan UMKM di Kalurahan Triwidadi menunjukkan arah yang positif, namun memerlukan penguatan dalam hal pendampingan berkelanjutan, pengembangan kapasitas digital, dan kolaborasi lintas sektor agar UMKM benar-benar menjadi pilar ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa angin segar bagi pembangunan desa. Sebab Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan bagi desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi lokal desa dan kepentingan masyarakat setempat. Pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Desa, telah mengatur bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Berkaitan dengan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk dari upaya untuk mendorong kemandirian desa itu sendiri dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa selaku penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentu memerlukan berbagai strategi dalam melaksanakan kewenangannya. Salah satu kepentingan masyarakat setempat yang harus dijawab oleh desa melalui peran pemerintah desa adalah perihal kesejahteraan. Dalam konteks ini, pemerintah desa

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat berdasarkan pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada disuatu desa tersebut.

Potensi lokal desa yang dapat dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat setempat, salah satunya yaitu perihal potensi Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sementara Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat di tingkat pedesaan tentunya akan sulit berkembang tanpa adanya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah desa itu sendiri. Dalam hal ini, pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa juga merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kewenangan desa itu sendiri, yaitu kewenangan desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Desa). Sedangkan pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang UMKM).

Berangkat dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan UMKM juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pemerintah desa. Sebab melalui pengembangan usaha masyarakat, maka masyarakat desa dapat memperoleh kemandirian ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan pemberdayaan merupakan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Artinya, konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dimaknai dalam konteks menempatkan posisi tawar masyarakat dalam segala aspek. Sehingga masyarakat dalam konteks ini tidak hanya diposisikan sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiary object*)

yang hanya bergantung pada pemberian pemerintah maupun dari pihak lainnya, tetapi masyarakat dapat menjadi subyek atau agen yang secara aktif berpartisipasi dan bertindak mandiri untuk menentukan masa depannya (Sutoro Eko, 2002).

Adapun pemberdayaan UMKM yang dimaksud peneliti pada konteks ini yaitu terhadap usaha ekonomi masyarakat di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil observasi peneliti, menunjukkan bahwa Kalurahan Triwidadi memiliki beberapa potensi UMKM lokal seperti kerajian batik, kerajinan nira kelapa, kerajian bambu, usaha warung makan dan kulineran, pedagang gudeg, manggar, pecel lele, tahu walik dan gula jawa, usaha emping garut, emping melinjo, pengrajin souvenir, dan peternakan ayam, sapi, serta masih banyak lagi usaha dari masyarakat setempat.

Namun, Melinjo yang merupakan salah satu komoditas lokal yang cukup melimpah di wilayah ini, dengan banyaknya pohon melinjo yang tumbuh di sekitar pemukiman warga. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan usaha emping melinjo di Kalurahan Triwidadi. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan sumber daya lokal yang belum optimal, kendala sumber daya manusia, keterbatasan modal, manajemen usaha yang belum optimal, dan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengembangkan usahanya, meskipun terdapat potensi besar dalam sektor UMKM, tantangan-tantangan tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan untuk berkembang lebih jauh.

Untuk menjawab permasalahan ekonomi masyarakat, salah satu strategi yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kalurahan Triwidadi adalah melalui program Desa Preneur. Program ini dirancang sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Triwidadi. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, ternyata dalam beberapa bulan terakhir pelaksanaan program ini masih belum berjalan secara optimal. Aktivitas Desa Preneur terpantau cukup vakum, dengan kegiatan yang terbatas hanya pada partisipasi dalam event dan pameran. Kegiatan paling akhir yang tercatat adalah pendataan UMKM pada tahun 2024.

Selain itu, Desa Preneur Triwidadi diketahui telah menjalin kerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kapanewon Pajangan, namun belum terdapat tindak lanjut program yang jelas hingga saat ini. Salah satu aktivitas yang saat ini dilimpahkan kepada Desa Preneur adalah pengelolaan peternakan kambing di kelurahan. Meski demikian, program ini pun masih dalam tahap awal dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum, keberadaan Desa Preneur di Kalurahan Triwidadi masih berada pada tahap pengembangan awal. Program ini memiliki potensi besar, namun realisasinya sejauh ini masih bersifat pasif dan belum memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara luas. Diperlukan strategi yang lebih terarah, pendampingan yang berkelanjutan, serta evaluasi menyeluruh agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan tersebut serta menganalisis/mengevaluasi efektivitas program Desa Preneur dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kalurahan Triwidadi. Dengan demikian, diharapkan potensi UMKM yang dimiliki oleh masyarakat Triwidadi yang cukup beragam, khususnya usaha emping melinjo, dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Triwidadi?

C. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini menggunakan teori Goeff Mulgan yaitu:

1. Arah tujuan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan UMKM.
2. Proses evaluasi dan pembelajaran strategi UMKM di tingkat desa.
3. Kebijakan dan arahan strategis desa dalam pengembangan UMKM.
4. Bentuk nyata program dan kegiatan pemberdayaan UMKM.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi UMKM

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah dan para pelaku UMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori strategi pembangunan desa, khususnya melalui pendekatan Geoff Mulgan yang menekankan lima indikator: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran.
 - b. Memperkaya kajian akademik tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM berbasis lokal.
 - c. Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas strategi pemberdayaan ekonomi di tingkat desa atau kawasan pedesaan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa: Memberikan masukan yang konstruktif dalam menyusun dan mengevaluasi strategi pemberdayaan UMKM agar lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

- b. Bagi Pelaku UMKM: Menyediakan informasi tentang bentuk dukungan strategis yang bisa dimanfaatkan, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

F. Literatur Riview

Pertama, Jurnal Pengabdian Masyarakat, penelitian oleh Ajeng Pipit Fitriani (2022, Vol. 1 No. 2) Institut Agama Islam Ponorogo, yang berjudul “*Strategi Pemasaran Dan Literasi Syariah Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM Masyarakat*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Broto merupakan desa yang berada di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo yang memiliki banyak aset desa yang berpotensi untuk dikembangkan terutama industri kecil pengolahan makanan ringan seperti olahan pisang, jagung dan obat keluarga (TOGA). Namun, amat disayangkan penjualan berbagai olahan makanan ringan ini belum terbilang maksimal, dikarenakan kurangnya strategi pemasaran baik segi kemasan maupun dari segi promosi. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal branding, packaging, dan promosi baik offline maupun online. Berangkat dari asset para pelaku UMKM yang telah memiliki usaha kecil ini, seminar manajemen dan strategi pemasaran ini layak untuk dilaksanakan. Pasca kegiatan seminar para pelaku UMKM juga berusaha menetapkan ilmu yang telah didapat, dengan memperbaiki branding, packaging, serta mempromosikan produknya melalui media sosial. Hasil evaluasi menunjukkan kemampuan para pelaku UMKM meningkat.

Kedua, Jurnal Dinamika Pemerintahan, penelitian oleh Muhammad Safar Akbari, dkk (2023, Vol. 6 No. 2) yang berjdul “*Strategi Pemerintah Desa*

Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di UMKM’ Dengan adanya dukungan strategi yang diberikan oleh pemerintah desa dapat menghasilkan output berupa masyarakat yang sudah mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis dan mampu untuk menopang dan membantu perekonomian keluarga melalui proses pemberian daya dan pengkapasitasan sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai.

Ketiga, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, penelitian oleh Salwa Dwi Maharani, dkk (2024, Vol. 11 No. 2) yang berjudul “Peran Penguanan Oleh Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Desa Banjarsari, Kabupaten Probolinggo” Penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap kajian penelitian mengenai peran pemerintah dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran dari Kabupaten Probolinggo sudah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini terbukti dari beberapa peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM di Desa Banjarsari yang sudah optimal meskipun masih adanya hambatan yang terjadi dalam proses pemberdayaan UMKM. Dalam pemberdayaan UMKM, pemerintah Desa Banjarsari berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Dalam upaya kebijakan pemberdayaan UMKM di Desa Banjarsari, peran pemerintah dalam regulatornya dengan memberikan aturan mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk memiliki legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan juga sertifikasi halal.

Keempat, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Penelitian oleh Ajeng Wulansari, dkk (2021 Vol 7 No. 1) yang berjudul “*Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM*” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sektor UMKM ini menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggerakan sumber daya lokal untuk spemerintah harus dimaksimalkan UMKM dapat berdaya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi di Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten dalam pemberdayaan UMKM belum berjalan secara optimal. Karena pembinaan dari pemerintah ini belum dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Selanjutnya para UMKM tidak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah daerah, dan sementara ini masih banyak UMKM yang belum mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

Kelima, Jurnal Pengabdian West Science , Penelitian oleh Rival Pahrijal, dkk (2024 Vol.03 No 04) yang berjudul “*Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi*” Artikel ini membahas upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis komunitas di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi, sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, program ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, meningkatkan keterampilan dan akses

pasar bagi UMKM, serta membangun jaringan kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM berbasis komunitas di Desa Cikahuripan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui pendekatan partisipatif dan implementasi strategi yang terarah, program ini berhasil meningkatkan keterampilan, memperluas akses pasar, dan membangun kolaborasi yang kuat antar-UMKM. Meskipun demikian, evaluasi akhir mengungkap beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program di masa mendatang, termasuk kurangnya pelatihan mendalam dan keterlibatan yang merata dari seluruh komunitas UMKM. Oleh karena itu, upaya terus menerus dalam memperbaiki dan mengembangkan program pemberdayaan UMKM ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Cikahuripan dan daerah sekitarnya.

Keenam, Jurnal Masharif al-Syariah:Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Penelitian oleh Yuni Ermawati, Pujiyanto, (2021 Vol.6, No 3) yang berjudul “Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis PKK di Desa Wisata Sekapuk Kabupaten Gresik” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Sekapuk berasal dari pengelolaan PKK yang bersifat mandiri. Sinergi antara PKK dan Pemerintah Desa menjadi tonggak kemandirian kebijakan dan sistem pengelolaan pemberdayaan UMKM. Peran Pemerintah Desa memberikan fasilitas dan stimulasi untuk kemandirian keberlangsungan UMKM dibawah PKK. Sistem bagi hasil menjadi cara yang efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang disinergikan dengan pengelolaan kawasan wisata.

Ketujuh, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian oleh Tjahjani Murdijaningsih, dkk (2023 Vol.02 No 02) yang berjudul “Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM di Era Ekonomi Digital”

Era ekonomi digital menjadi kesempatan yang besar bagi UMKM untuk berkembang dikarenakan terbukanya akses informasi bagi UMKM. Tetapi sebagian UMKM ada di desa-desa yang sering terkendala dengan adanya perkembangan ekonomi digital terutama digitalteknologi. Metode Pengabdian masyarakat adalah melalui transfer pengetahuan dan pendampingan. Hasil pengabdian masyarakat adalah tambahnya pengetahuan pelaku UMKM di Desa Pagenteran tentang ekonomi digital didalam pengelolaan UMKM, baik pemasaran, keuangan maupun inovasi produk. Hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat serta pendampingan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perlu adanya kesadaran penuh masyarakat terutama pelaku UMKM untuk melek teknologi dalam mengelola UMKM baik dalam pemasaran, inovasi produk sehingga dapat menjadi peluang bisnis yang mempunyai nilai tambah dalam perekonomian keluarga. Perlu adanya pengetahuan dan pendampingan yang lebih terkait dengan pemasaran dan pengelolaan UMKM agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan dikelola secara profesional melalui penguatan teknologi digital.

Kedelapan, Jurnal Of Business and Economic Researc, penelitian oleh Ronda Deli Sianturi tahun (2020, Vol. 1 No. 1) yang berjudul “Manajemen Pemasaran Menggunakan Analisis SWOT Pada UMKM Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM”. Berdasarkan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa

kesimpulan untuk menentukan strategi pemasaran bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM tersebut, antara Analisis SWOT dapat dilakukan untuk melakukan analisis terhadap faktor – faktor lingkungan Eksternal juga Lingkungan Internal bagi pelaku UMKM. Selain itu, Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran pada UMKM.

Kesembilan, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, penelitian oleh Ahmad Hazas Sharif, dkk (2023 Vol.1 No 4) yang berjudul “*Pemberdayaan UMKM Gula Aren Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran*” kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji strategi optimalisasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam produksi dan pemasaran gula aren berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal. Metode yang digunakan melibatkan observasi, penyuluhan, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan. Pengabdian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah gula aren dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan dan ekonomi lokal. Implikasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah gula aren berbasis kearifan lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sepuluh, Jurnal Skripsi, Penelitian oleh Ariansyah, dkk (2022 Vol.02 No 02) yang berjudul “*Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar*” Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya modal usaha yang dimiliki

UMKM, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan kurangnya penyediaan sarana dari pemerintah Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan *conclusion drawing/verification*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi Pemerintah Desa melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar secara umum kurang optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berwirausaha, kegiatan sosialisasi dan mengajukan permohonan penambahan anggaran.

Berangkat dari uraian *literature review* di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada umumnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat. Maka tidak heran apabila pemerintah Desa, bahkan pemerintah Nasional pun terus berupaya untuk mendorong kemajuan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian bagi masyarakat. Sebagaimana yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah, termasuk pemerintah Desa pada konteks ini sangat penting dalam melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Adapun bentuk pemberdayaan UMKM

yang secara umum disinggung dalam penelitian terdahulu yaitu berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku maupun kelompok UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam konteks pemberdayaan UMKM memang secara umum memiliki kesamaan, tetapi dilain sisi juga mememiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut. Adapun perbedaan yang dimaksudkan yaitu antara lain: 1) secara fokus penelitian, dalam penelitian ini tidak hanya menitik beratkan pada bentuk program pemberdayaan UMKM seperti pelatihan dan pendampingan, sehingga ada kemungkinan untuk mengkaji program pemberdayaan dalam bentuk yang lain; 2) penelitian ini juga lebih menekankan pada strategi atau peran yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan/Desa dalam mengembangkan UMKM setempat yang sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa yang dimiliki oleh Kalurahan/Desa Triwidadi; dan 3) lokasi dan waktu penelitian juga menjadi faktor pembeda dengan penelitian terdahulunya, karena setiap lokasi penelitian memiliki perbedaan kondisi sosial budaya masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa dan secara waktu penelitian juga sangat berpengaruh terhadap relevansi data dan perkembangan situasi dan kondisi mengenai obyek yang diteliti.

G. Kerangka Konsep Penelitian

1. Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kewenangan untuk memerintah dan menerapkan hukum dalam suatu wilayah. Dalam arti sempit, ini merujuk pada badan eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Dalam arti luas, pemerintah mencakup

seluruh aparatur negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bersama-sama menjalankan fungsi kepemimpinan dan pelayanan publik.

Pemerintah adalah entitas organisasi yang memiliki kekuasaan sah berdasarkan kedaulatan rakyat, bertanggung jawab menjaga ketertiban, menjalankan hukum, dan mengimplementasikan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Di sini pemerintah adalah aktor utama dalam penyelenggaraan negara.

Secara konseptual, pemerintahan mengacu pada proses, cara, atau sistem yang dijalankan oleh pemerintah dalam melaksanakan wewenangnya. Ini mencakup kegiatan seperti membuat kebijakan, mengambil keputusan, pelaksanaan program, serta koordinasi antar lembaga negara.

Pemerintahan juga sering dimaknai sebagai sistem tata kelola lembaga publik, di mana relasi antara yang memerintah (organ pemerintah) dan yang diperintah (masyarakat) diatur berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi formal. Konsep good governance (pemerintahan yang baik) banyak digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan modern.

2. Pemerintah Kalurahan/Desa

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang secara aktual berhubungan langsung dengan masyarakat lokal perdesaan. Melihat posisinya yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa, maka pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggara pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) pada pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Berkaitan dengan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menerangkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Adapun kewenangan desa yang dimaksud yaitu meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Pasal 18 Undang-Undang Desa). Keempat kewenangan desa tersebut pada gilirannya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan di tingkat desa.

Lebih lanjut, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, yaitu antara lain:

- a. Sekretaris Desa. Jabatan ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes) dan dibantu oleh staf. Sekdes terdiri atas tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. Masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepada Urusan (Kaur);
- b. Pelaksana Teknis. Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan. Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayah. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana wilayah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Selain itu, jumlah pelaksana kewilayah juga berdasarkan jumlah dusun dengan memperhatikan luas wilayah kerja, kepadatan penduduk, kondisi geografis dan sarana prasarana penunjang tugas; yang kemudian dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam Undang-Undang Desa tepatnya pada pasal 26 menerangkan bahwa pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa yang juga dibantu oleh perangkat desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Desa secara eksplisit berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; menetapkan peraturan desa; menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa; membina

kehidupan masyarakat desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; mengembangkan sumber pendapatan desa; mengusulkan dan menerima sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa juga berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban, maka pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, dengan adanya otonomi desa maka pemerintah desa juga

memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan desa secara mandiri, yang dapat disesuaikan dengan potensi desa dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Namun, penyelenggaraan otonomi desa juga mempunyai keterhubungan dengan sistem pemerintahan nasional dan kepentingan pembangunan nasional. Sehingga posisi pemerintah desa pada konteks ini tidak terpisah dengan pemerintah di atasnya, tetapi sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan demikian, pada konteks tertentu, pemerintah desa juga dapat melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi maupun pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dilain sisi, desa juga dituntut agar mampu mengelola kewenangan yang berskala lokal desa secara mandiri guna percepatan pembangunan secara nasional. Hal ini mengartikan bahwa kemandirian desa juga dapat memainkan peranan yang signifikan dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di dalam negeri. Karena itulah, tanggung jawab negara pada desa juga tidak pernah lepas. Hal ini dapat dilihat dari adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun alokasi dana dari pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, signifikansi dari kemandirian desa juga bermuara pada peran desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), sehingga tidak secara terus-terus bergantung pada alokasi dana dari pemerintah di atasnya yang bersifat terbatas. Sebab, untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat desa, tentu akan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, sehingga dengan adanya

PADesa yang memadai dapat membantu kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh desa itu sendiri.

3. Pengertian Strategi

Strategi adalah sebuah alat yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan atau lembaga yang tujuannya dalam jangka panjang serta program tindak lanjut prioritas alokasi sumber daya. Kotten dalam (Maulidiana, 2018) mengemukakan bahwa strategi adalah suatu rencana seorang pemimpin dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang yang disertai dengan penyusunan cara atau upaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan definisi strategi menurut Supriono merupakan suatu kesatuan program atau rencana organisasi atau lembaga yang disusun secara komprehensif yang tentunya diperlukan dalam semua kegiatan organisasi. Pada saat yang sama, strategi yang sudah diterapkan oleh suatu organisasi akan diterapkan sebagai basis kekuatan terpisah untuk penyesuaian dalam lingkungan yang terus berubah (Gustiman, 2021).

Geoff Mulgan menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan sendiri, lebih mengidentifikasi pada strategi bagi lembaga pembuat kebijakan (pemerintah). Dimana strateginya dibuat untuk dapat berguna sebagai sistem yang akan mengatur sumber daya yang tersedia melalui lembaga publik. Menurut definisi di atas, Geoff Mulgan, memaparkan strategi pengelolaan pemerintahan dalam lima (5) indikator yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environtment*

(Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learnin'g* (Pembelajaran) (Christian, 2020).

Rumusan strategi sebuah alat atau pedoman dari lembaga pemerintahan yang digunakan dalam mencapai tujuan UMKM masyarakat yang lebih baik atau lembaga yang tujuannya dalam jangka panjang serta program tindak lanjut prioritas alokasi sumber daya. Strategi dalam pengembangan UMKM kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Triwidadi perlu adanya pertanggung jawaban dari pemerintah Kalurahan Triwidadi untuk membantu menstimuluskan pendapatan UMKM agar tetap stabil seperti pembinaan marketing dan pelatihan manajemen usaha dan analisis SWOT. Menurut Solihin dalam (P. Anggraeni et al., 2017), analisis SWOT sendiri merupakan alat analisis yang bertahan paling lama dan banyak digunakan untuk melakukan analisis situasional dalam perumusan strategi. *The Strengths Weaknesses-Opportunities-Threats Matrix* (SWOT Matrix) merupakan alat penting untuk membantu manajer mengembangkan empat jenis strategi, yaitu SO (*strengths-opportunities*), WO (*weaknessesopportunities*), ST (*strengths-threats*), dan WT (*weaknesses-ancaman*).

4. Pemberdayaan

Menurut Sobirin (2008) menjelaskan bahwa pemberdayaan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*empowerment*” yang dapat dimaknai sebagai pemberian kekuasaan. Hal ini karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu, tetapi

juga mempunyai kuasa. Ia juga mengemukakan bahwa pada prinsipnya pemberdayaan dapat dikembangkan dalam beberapa makna, yaitu:

- a. Pemberdayaan sebagai proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi;
- b. Pemberdayaan sebagai metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya;
- c. Pemberdayaan sebagai program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
- d. Pemberdayaan sebagai gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- e. Pemberdayaan sebagai pemberi otoritas, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.

Dalam hal ini, pemberdayaan berarti proses meyiapkan sumber daya kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan di dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti bahwa konsep pemberdayaan merupakan upaya penguatan modal sosial di dalam masyarakat.

Menurut Sutoro Eko (2002) pemberdayaan merupakan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Artinya, konsep

pemberdayaan masyarakat desa dapat dimaknai dalam konteks menempatkan posisi tawar masyarakat dalam segala aspek. Sehingga masyarakat dalam konteks ini tidak hanya diposisikan sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiary object*) yang hanya bergantung pada pemberian pemerintah maupun dari pihak lainnya, tetapi masyarakat dapat menjadi subyek atau agen yang secara aktif berpartisipasi dan bertindak mandiri untuk menentukan masa depannya.

Menurut Jim Ife dalam Suharto (2004) menjelaskan bahwa defensi pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan turut berpartisipasi mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Jim Ife dalam Maarif (2021) berpandangan bahwa pemberdayaan mengandung dua konsep kunci, yaitu *power* (kekuasaan/daya) dan *disadvantaged* (ketimpangan/kelompok lemah). Dengan demikian, maka pengertian pemberdayaan dapat dikontekskan pada empat perspektif, yakni: pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalist.

- a. Perspektif pluralis: memandang pemberdayaan sebagai proses untuk menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat mamput bersaing lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan

tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main).

- b. Perspektif elitis: melihat pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan *elite*, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan *elite*. Upaya ini dilakukan mengingat adanya pengaruh (*power* dan *control*) yang kuat dari kalangan *elite*, sehingga cenderung membuat masyarakat menjadi tidak berdaya.
- c. Perspektif strukturalis: menekankan bahwa pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural di dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural yang mengakibatkan ketimpangan, pemiskinan, marjinalisasi dan ketidakberdayaan masyarakat.
- d. Perspektif post-strukturalis: menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Dengan demikian, bentuk pemberdayaan yang dilakukan lebih menekankan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan/program atau upaya-upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan tergantung pada perspektif apa yang melatarbelakanginya. Akan tetapi, apapun pendekatan dan perspektifnya, semua sepakat bahwa ketidakberdayaan masyarakat adalah suatu masalah (*problem*) yang harus disikapi dengan tindakan praktis dan kritis-reflektif, yang pada gilirannya mengupayakan berbagai cara untuk membuat masyarakat menjadi lebih kuat dan berdaya. Dengan demikian, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses dan tujuan yang memperkuat harkat dan martabat kelompok masyarakat yang rentan, lemah, dan termarjinalisasi.

Oleh karenanya, Syamsul Bahri (2021) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada keadaan atau hasil yang hendak dicapai dalam kerangka perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya dan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Secara umum UMKM diartikan sebagai usaha produktif baik yang dimiliki secara perorangan maupun dalam bentuk badan usaha, yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Sofyan (2017) UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam pertumbungan ekonomi di

Indonesia karena berperan dalam memperbaiki perekonomian baik ditinjau dari jumlah usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM, menyebutkan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, maka UMKM pada intinya merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berkaitan dengan kriteria UMKM tersebut, pada pasal 6 dalam UU UMKM menyebutkan bahwa:

- a. Kriteria Usaha Mikro yaitu: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.
- b. Kriteria Usaha Kecil yaitu: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 dan tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.
- c. Kriteria Usaha Menengah yaitu: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.500.000.000 dan tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Jika dilihat dari kriteia UMKM di atas, nampaknya masing-masing jenis usaha tersebut memiliki perbedaan dalam bentuk kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang diperolehnya. Jika dilihat dari besaran modal dan omset yang dipatok, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat pelaku usaha di Indonesia terutama di Desa-Desa lebih cenderung mengembangkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku usaha masih mengalami masalah permodalan,

dimana modalnya cenderung kurang dari Rp 100.000.000 (seratus juta). Artinya, akses terhadap modal dalam mengembangkan usaha atau bisnis pada konteks ini menjadi sangat penting, mengingat kondisi perekonomian mayoritas masyarakat Indonesia yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah tentu akan menjadi tantangan tersendiri yang harus dipecahkan baik oleh masyarakat terutama pelaku UMKM maupun oleh pemerintah.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya UMKM selalu yang terutama dalam menggerakkan perekonomian nasional karena jumlah pelaku usahanya yang mayoritas. Salah satu kontribusi UMKM dalam hal ini adalah penyerapan tenaga kerja, sehingga UMKM pun turut membantu pemerintah dalam hal pengentasan pengangguran dan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, menggolongkan UMKM menjadi empat kategori industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, yakni: 1) disebut sebagai industri rumah tangga apabila memiliki tenaga kerja 1-4 orang; 2) industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-9 orang; 3) industri sedang/menengah jika memiliki jumlah tenaga kerja 10-99 orang; dan 4) industri besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang (Budiarto, 2015). Dari kategori ini, dapat pula disimpulkan bahwa usaha yang dikembangkan pada UMKM masih bersifat industri rumah tangga dan industri kecil, karena kebanyakan dari pelaku usaha yang kita temui sehari-hari hanya memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 9 orang saja.

Oleh karenanya, UMKM di Indonesia masih memiliki permasalahan yang berarti, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya bimbingan dan pembinaan, keterbatasan pengetahuan dan teknologi, permodalan, manajemen pengelolaan yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, sulitnya memperoleh bahan baku, sulitnya memperoleh izin usaha atau badan hukum, dan keterbatasan dalam pemasaran (Amri, 2014). Untuk itu, pemerintah pun terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap UMKM agar mampu mengembangkan potensi yang ada guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Eksploratif . Menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang suatu hal yang dialami oleh subyek penelitian secara mendalam melalui pengamatan terhadap perilaku, persepsi, motivasi, perasaan, tindakan, dan lain sebagainya yang dideskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggali, memahami, dan menemukan secara mendalam fenomena sosial yang belum banyak diteliti atau belum dipahami secara jelas. Fokusnya adalah mengeksplorasi realitas,

makna, serta pengalaman subjek secara alami dan kontekstual, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan eksploratif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, termasuk nilai, sikap, motivasi, dan persepsi yang sulit diukur dengan angka.

2. Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti. Adapun permasalahan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini yaitu tentang proses Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Triwidadi.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi subyek atau informan dalam penelitian ini yaitu meliputi: Perwakilan dari Pemerintah Kalurahan (2 Orang), Pengurus Desa Preneur (1 orang), Pelaku UMKM (3 orang).

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Slamet Riyanto	47 Tahun	SMK	Lurah
2.	Anita Y. Fatmawati, Amd	34 Tahun	D3	Carik
3.	Suratman	32 Tahun	D3	Ketua Desa Preneur
4.	Ariyanti	47 Tahun	SMEA	Pelaku UMKM
5.	Purwanti	50 Tahun	SD	Pelaku UMKM
6.	Sudarwati	51 Tahun	SD	Pelaku UMKM

Sumber: Data Lapangan

4. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2000) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang dipilih dan digunakan oleh peneliti guna mempermudah proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan secara komprehensif dan tersistimatis.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengamati segala kondisi dan peristiwa yang terjadi disekitar kehidupan manusia. Menurut Bachtiar dkk. (1985) kegiatan penelitian mulanya hanya diarahkan pada usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan tentang lingkungan alam manusia, tetapi terus berkembang pada usaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas seperti kegiatan manusia, hubungan antar manusia, pikiran dan perilaku manusia itu sendiri.

Dalam observasi penelitian ini, peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana proses Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Triwidadi.

b. Wawancara

Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2010) wawancara merupakan suatu kegiatan dimana terjadinya pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang dapat

menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan antar dua orang atau bahkan lebih, yang saling bertemu atau bertatap muka, melakukan *sharing* ide dan pengalaman tentang obyek atau fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan seperti Pemerintah Desa, pengurus BUMKal, pelaku UMKM, Pengurus Desa Preneur yang sekiranya dapat memberikan informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti perihal bagaimana proses Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Triwidadi.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Mulyana (2002) dokumentasi merupakan bahan tertulis, rekaman atau film tertentu yang tidak terpisahkan dengan kebutuhan penelitian. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat notulen rapat dan sebagainya. Artinya, seorang peneliti dapat pula menggunakan dokumen-dokumen tersebut dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Adapun dokumen penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa file dan arsip tulisan yang memuat data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti profil Kalurahan/Desa, Peraturan Kalurahan/Desa, data penduduk, laporan kegiatan, notulensi rapat, laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan/Desa, struktur organisasi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan Desa, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sarwono (2006) analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada adanya hubungan semantik antara variabel yang diteliti. Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa teknik analisis data yaitu meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu kemudian membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian, maka data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data, menemukan topik pembahasan yang akan dianalisis. Ini berarti bahwa reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan dinarasikan dalam bentuk tulisan oleh peneliti.

b. Pengajian Data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan pada data yang telah direduksi kemudian dituangkan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan dan perasaan yang sering dan dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari seangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. \

BAB II

PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. Kondisi Kelurahan

1. Sejarah Kalurahan Triwidadi

Triwidadi adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdiri pada tanggal 19 Oktober 1946, sekitar satu tahun setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII memberikan maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang berisi pernyataan bahwa wilayah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangannya juga dilakukan penetapan Organisasi Pemerintahan Daerah Yogyakarta sampai di tingkat kalurahan pembentukan Dewan Kalurahan dan Penggabungan Kalurahan.

Kalurahan Triwidadi merupakan penggabungan Tiga Kalurahan yang terdiri dari Kalurahan Kersan, Trucuk dan Sokodadi. Berikut Kalurahan Kersan terdiri dari 11 padukuhan, Kalurahan Trucuk terdiri dari 5 padukuhan, dan Kalurahan Sokodado terdiri dari 6 padukuhan. Melalui musyawarah para tokoh pada masa itu dengan berbagai pertimbangan maka terpilihlah Bapak Harjo Soetomo yang disebut sebagai Lurah di Kalurahan Triwidadi dan selanjutnya dilakukan pemilihan aparatur Kalurahan seperti Carik, Jogoboyo,

Kemakmuran, Kamituwo, dan lain sebagainya. Pada tahun 1946 s/d 1988 Bapak Harjo Soetomo menjabat sebagai Lurah Kalurahan Triwidadi. Selanjutnya Kalurahan Triwidadi melaksanakan pemilihan Kepala Desa pertama kali diikuti oleh 8 (delapan) Calon Kepala Desa dan yang terpilih Bapak Mardiono masa jabatan Tahun 1990 s/d 1998 dan terpilih lagi pada Tahun 1999 s/d 2008. Pada pemilihan Kepala Desa berikutnya yang terpilih Bapak Slamet Riyanto menjabat Tahun 2008 s/d 2014 dan Kembali terpilih Tahun 2014 s/d 2020. Dilaksanakan pemilihan Lurah Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan ayat (2) kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam pelaksanaan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak Tahun 2020. Maka pada pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2020 Slamet Riyanto calon Lurah Triwidadi terpilih untuk masa jabatan Lurah 2021 s/d 2026.

Tabel 2. Kepala Desa/Lurah Yang Pernah Menjabat Di Kalurahan Triwidadi

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Lurah I	Harjo Soetomo	Tahun 1946 s/d 1988
2	Lurah II	Mardiono	Tahun 1990 s/d 2008
3	Lurah III	Slamet Riyanto	Tahun 2008 s/d 2026

Sumber: RPJMKAL, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak berdirinya Kalurahan Triwidadi pada tahun 1946 s/d 2020 dilaksanakan 6 kali pemilihan kepala Desa/Lurah dan secara personal ada tiga orang yang menjabat kepala Desa/Lurah.

2. Keadaan Geografis

a. Luas Wilayah

Kalurahan Triwidadi merupakan satu dari tiga kalurahan yang berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Kalurahan Triwidadi berdasarkan keadaanya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, daerah datar sebesar 20% dan daerah perbukitan 80%. Pada daerah perbukitan, memiliki tebing-tebing yang sangat curam dengan kemiringan 30-80° di beberapa padukuhan (Pemerintah Kalurahan Triwidadi, 2021).

b. Batas Wilayah

Kalurahan Triwidadi merupakan salah satu dari tiga Kalurahan yang ada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dengan wilayah, sebagai berikut:\

- 1) Utara berbatasan dengan Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu.
 - 2) Timur berbatasan dengan Kalurahan Bangunjwo, Kapanewon Kasihan.
 - 3) Selatan berabatsan dengan Kalurahan Sendang Sari, Kapanewon Pajangan.
 - 4) Barat berbatasan dengan Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu
- Kalurahan Triwidadi terdiri dari 22 padukuhan yaitu:
- 1) Dukuh Guwo
 - 2) Dukuh Jogonandan
 - 3) Dukuh Jojoran Wetan
 - 4) Dukuh Jojoran Kulon
 - 5) Dukuh Jambean
 - 6) Dukuh Kayuhan Wetan
 - 7) Dukuh Kayuhan Kulon
 - 8) Dukuh Nanggul
 - 9) Dukuh Kersan
 - 10) Dukuh Plambongan
 - 11) Dukuh Sabrang Kidul
 - 12) Dukuh Sabrang Lor
 - 13) Dukuh Trucuk
 - 14) Dukuh Polaman
 - 15) Dukuh Gampeng
 - 16) Dukuh Butuh Kidul

17) Dukuh Butuh Lor

18) Dukuh Pajangan

19) Dukuh Blabak

20) Dukuh Kadiresa

21) Dukuh Kalisoko

22) Dukuh Ngincep

c. Kondisi Topografi

Kalurahan Triwidadi berada pada ketinggian 110-300mdpl, dengan suhu 20-30 °C, dengan luas wilayah ± 130 hektar, perbukitan ± 300 hektar, tanah subur 80 hektar, tidak subur ± 56 hektar. Luas wilayah keseluruan ± 430 hektar.

Jenis tanah di Kalurahan Triwidadi adalah tanah marjinal, yang ditandai dengan struktur tanah yang keras dan pecah-pecah. Lapisan tanah tipis dengan banyak batuan bahan tambang galian atau batu putih, dengan kondisi yang kurang subur (pijiastuti et al, 2018). Dengan kondisi topografi tersebut rasanya tidak memungkinkan apabila masyarakat Kalurahan Triwidadi mengandalkan sektor pertanian pangan dan holtikultura seperti masyarakat perdesaan pada umumnya.

1) Hidrologi

Alam di Kalurahan Triwidadi adalah sebagian besar wilayah perbukitan memiliki tingkat air tanah yang rendah, yang menyebabkan tada hujan mendominasi. Tingkat erosi tinggi menyebabkan kesuburan tanah menurun, dan ketersediaan air tanah

hanya bertahan selama musim hujan dan paling lama empat bulan pada musim kemarau, sehingga sebagian besar wilayah Kalurahan Triwidadi kekeringan. Sumber air yang ada saat ini sangat terbatas, dan sumber air lainnya jauh dari permukiman.

2) Geologi

Area Kalurahan Triwidadi adalah perbukitan atau pegunungan dengan lapisan tanah tipis, banyak bebatuan, dan tanah tidak subur. Ada potensi tanah galian atau batu putih disana.

3) Orbitasi

Kalurahan Triwidadi berada di sebelah barat wilayah Kabupaten Bantul. Jarak orbitasi dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon Pajangan: 4,00 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Bantul: 19,00 Km
- 3) Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten Bantul: 12,00 Km
- 4) Jarak dari Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 19,00 Km

d. Kondisi Alam Untuk Fauna dan Flora

Kondisi Alam Kalurahan Triwidadi terdiri dari perkebunan dan lahan pertanian. Jenis tanaman umumnya dapat tumbuh, dan berbagai jenis tanaman obat dapat ditemukan di wilayah tertentu. Tanaman pertanian yang tersedia termasuk padi, jagung, kacang tana, kedelai, dan ketela yang juga dikenal sebagai singkong. Sedangkan untuk jenis hewan

yang masih ada dan berkembang di Kalurahan Triwidadi burung drekuku, burung pipit, dan jenis satwa lainnya yang masih ada. Meskipun saat ini jenis burung tersebut banyak di buruh, tetapi masih ada di alam liar.

3. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kalurahan Triwidadi secara keseluruhan berjumlah 10.875 jiwa dan 3.554 KK dapat diketahui perincinya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	5.407
2	Perempuan	5.468
	Jumlah	10.875

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa, data Monografi Desa Semester II Tahun 2020, jumlah penduduk desa tercatat sebanyak 10.875 jiwa, yang terdiri dari 5.407 laki-laki dan 5.468 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, dengan selisih 61 jiwa. Komposisi penduduk yang relatif seimbang ini mencerminkan struktur demografis desa yang stabil dan proporsional. Menurut Peneliti, Keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan merupakan modal sosial penting dalam pembangunan desa, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, maupun partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Selisih yang kecil antara kedua jenis kelamin juga menunjukkan bahwa tidak ada dominasi yang mencolok, sehingga kebijakan pembangunan berbasis gender dapat lebih mudah diterapkan secara adil dan merata. Dengan demikian, data ini dapat menjadi pijakan awal dalam perencanaan program-program pelayanan publik, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta strategi pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan inklusivitas.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0-15 Tahun	2.211
2	16-65 Tahun	7.435
3	>65 Tahun	1.128
	Jumlah	10.774

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, data Monografi Desa Semester II Tahun 2020, total jumlah penduduk desa adalah 10.774 jiwa, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori usia utama: usia anak-anak dan remaja, usia produktif, serta usia lanjut. Penduduk dengan rentang usia 0–15 tahun berjumlah 2.211 jiwa, atau sekitar 20,3% dari total populasi. Kelompok ini merupakan generasi muda yang masih bergantung pada orang tua atau wali, dan membutuhkan perhatian khusus dalam bidang pendidikan, gizi, dan perlindungan anak. Kelompok usia 16–65 tahun, yang termasuk kategori usia produktif, merupakan

kelompok terbanyak dengan jumlah 7.435 jiwa, atau sekitar 68,3% dari total penduduk.

Menurut peneliti, komposisi penduduk ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Kelurahan Triwidadi berada dalam usia produktif, yaitu usia yang secara umum mampu bekerja, berwirausaha, dan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, kelompok usia di atas 65 tahun tercatat sebanyak 1.128 jiwa, atau sekitar 10,4% dari total penduduk. Jumlah ini menandakan bahwa desa juga memiliki populasi lansia yang cukup signifikan, yang membutuhkan perhatian dalam layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan dukungan keluarga.

Dengan jumlah usia produktif yang dominan, desa memiliki potensi demografi yang besar untuk mendorong pembangunan, pemberdayaan UMKM menjadi strategi yang tepat untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi tingkat ketergantungan ekonomi dari kelompok usia non-produktif. Pemberdayaan ini tidak hanya sebatas pada penyediaan modal usaha, namun juga mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan, hingga akses pasar dan teknologi. Melalui strategi yang tepat dan berorientasi pada potensi lokal, pemerintah desa diharapkan mampu mengoptimalkan dengan baik peran UMKM sebagai pilar ekonomi desa serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Triwidadi secara menyeluruh.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil	105
2	TNI/polri	32
3	Swasta	653
4	Wiraswasta/pedagang	55
5	Petani	603
6	Tukang	37
7	Buruh Tani	1.108
8	Pensiunan	57
9	Nelayan	1
10	Peternak	19
11	Jasa	125
12	Pengrajin	196
13	Pekerja Seni	12
14	Lainnya	5.853
15	Tidak Bekerja/pengangguran	1.918
	Jumlah	10.774

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Berdasarkan data dari Monografi Desa Semester II Tahun 2020, jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan mata pencaharian sebanyak 10.774 jiwa. Data ini memberikan gambaran penting tentang struktur ekonomi masyarakat desa dan pola kerja yang berkembang di lingkungan tersebut. Dari keseluruhan data, kelompok terbesar berada pada kategori “Lainnya” sebanyak 5.853 jiwa, yang kemungkinan mencakup berbagai jenis pekerjaan informal, belum terklasifikasi secara spesifik, atau mereka

yang memiliki aktivitas di luar kategori pekerjaan formal. Selain itu, terdapat 1.918 jiwa yang tidak bekerja atau pengangguran, yang mencerminkan adanya tantangan dalam ketersediaan lapangan kerja serta perlunya program pemberdayaan ekonomi. Sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi desa, dengan 1.108 jiwa bekerja sebagai buruh tani, serta 603 jiwa sebagai petani, sehingga total kontribusi sektor pertanian mencapai 1.711 jiwa, atau sekitar 15,9% dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada sektor agraris, baik dalam skala kepemilikan lahan sendiri maupun sebagai tenaga kerja harian.

Sementara itu, sektor swasta juga memberikan kontribusi cukup signifikan dengan 653 jiwa, disusul oleh sektor jasa (125 jiwa), pengrajin (196 jiwa), dan wiraswasta/pedagang (55 jiwa), yang menunjukkan adanya keragaman ekonomi dan potensi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun jumlah pegawai negeri (105 jiwa), personel TNI/Polri (32 jiwa), pensiunan (57 jiwa), serta pekerja seni (12 jiwa) masih tergolong kecil secara persentase terhadap populasi. Profesi nelayan (1 jiwa) dan peternak (19 jiwa) menunjukkan bahwa sektor kelautan dan peternakan belum berkembang secara luas di desa ini. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada di sektor informal, agraris, dan tidak bekerja. Sehingga, menurut peneliti perlu strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah seperti pelatihan keterampilan kerja, akses ke permodalan usaha, dan perluasan

lapangan kerja produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Triwidadi secara menyeluruh.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Taman Kanak-Kanak	2.166
2	Sekolah Dasar/Sederajat	1.203
3	SMP	2.672
4	SMU/SMA	2.029
5	Akademi/D1-D3	156
6	Sarjana	235
7	Pascasarjana (S2)	16
8	Pondok Pesantren	34
9	Pendidikan Keagamaan	19
10	Sekolah Luar Biasa	15
11	Kursus Keterampilan	28
12	Tidak Lulus	458
13	Tidak Sekolah	1.743
	Jumlah	10.774

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 10.774 jiwa penduduk, tingkat pendidikan masyarakat desa sangat beragam, mulai dari yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali hingga jenjang pascasarjana. Kelompok terbesar berasal dari lulusan SMP sebanyak 2.672 jiwa, disusul oleh lulusan SMA/SMU sebanyak 2.029 jiwa dan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2.166 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengakses pendidikan dasar dan

menengah, yang merupakan modal penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, terdapat pula jumlah yang signifikan belum mengenyam pendidikan formal, yakni sebanyak 1.743 jiwa yang tidak sekolah dan 458 jiwa yang tidak lulus sekolah. Jika digabungkan, ini berarti sekitar 2.201 jiwa (lebih dari 20%) dari total populasi belum menyelesaikan pendidikan dasar, yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran literasi masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan akses atau keberlanjutan pendidikan di masyarakat, yang dapat berdampak pada keterbatasan keterampilan dan rendahnya partisipasi dalam dunia kerja dan kewirausahaan.

Menurut peneliti, rendahnya tingkat pendidikan formal tidak lantas menjadi hambatan utama, tetapi justru menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang kontekstual dan tepat guna. Misalnya, dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, pendampingan usaha secara langsung, dan penyediaan akses informasi usaha dalam bentuk yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, potensi lulusan SMA dan sarjana dapat dioptimalkan sebagai penggerak atau pendamping UMKM, sehingga mendorong kolaborasi antargenerasi dalam peningkatan kapasitas usaha lokal.

Dengan memperhatikan karakteristik pendidikan masyarakat, strategi pemberdayaan UMKM di Kelurahan Triwidadi tidak hanya

ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh warga, tanpa memandang latar belakang pendidikan formalnya.

Sementara itu, jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi seperti Akademi/D1-D3 sebanyak 156 jiwa, Sarjana sebanyak 235 jiwa, dan Pascasarjana (S2) sebanyak 16 jiwa, masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Ini menunjukkan bahwa akses dan minat terhadap pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Selain jalur pendidikan formal, masyarakat juga mengakses pendidikan non-formal seperti pondok pesantren (34 jiwa), pendidikan keagamaan (19 jiwa), kursus keterampilan (28 jiwa), dan sekolah luar biasa (15 jiwa), yang menunjukkan adanya keberagaman jalur pendidikan sesuai kebutuhan dan latar belakang masyarakat.

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial

Kehidupan masyarakat di Kalurahan Triwidadi umumnya cukup terorganisir. Ada banyak kelompok social di Kalurahan Tiwidadi baik di tingkat padukuhan dan kalurahan. Di Kalurahan Triwidadi, ada banyak kelompok sosial, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, RT, Dasa Wisma, Kelompok Arisan/simpan pinjam, Kelopok Jimpit, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM), dan Kelompok Gotong-Royong. Kegiatan sosial, seperti budaya gotong royong,

berlangsung dengan baik di seluruh padukuhan Kalurahan Triwidadi meskipun tidak diatur secara formal.

b. Keadaan Ekonomi

Kalurahan Triwidadi merupakan wilayah yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang beragam. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut mata pencaharian dan tingkat pendidikan, terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan dan dominasi pekerjaan sektor informal, terutama di bidang pertanian dan buruh tani.

Dari total 10.774 jiwa, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani (1.108 jiwa) dan petani (603 jiwa). Jumlah ini menandakan bahwa perekonomian desa masih sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional, yang secara umum memiliki nilai tambah ekonomi yang rendah dan rentan terhadap ketidakpastian hasil panen. Selain itu, terdapat 653 jiwa yang bekerja di sektor swasta, serta 196 jiwa sebagai pengrajin, yang menunjukkan adanya potensi dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.

Namun, angka yang cukup tinggi juga muncul dari kategori penduduk yang tidak bekerja/pengangguran, yaitu sebanyak 1.918 jiwa, serta kelompok "lainnya" sebanyak 5.853 jiwa, yang belum terkласifikasi secara jelas. Ini menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi produktif secara formal maupun informal. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas penduduk

Triwidadi hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP (2.672 jiwa) dan SMA (2.029 jiwa). Sementara jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi seperti Sarjana (235 jiwa) dan Pascasarjana (16 jiwa) masih sangat rendah. Hal ini turut memengaruhi pola mata pencaharian, di mana sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor padat karya dan tidak berbasis keahlian atau profesionalisme.

Sementara itu, jumlah penduduk yang tidak sekolah (1.743 jiwa) dan tidak lulus (458 jiwa) menandakan adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan formal yang dapat berimplikasi langsung pada rendahnya kemampuan bersaing dalam dunia kerja maupun wirausaha. Pendidikan yang terbatas turut berdampak pada minimnya inovasi dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi ini menegaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi di Kelurahan Triwidadi perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM, dengan memperhatikan keterbatasan pendidikan dan dominasi sektor informal. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan pelatihan keterampilan, peningkatan literasi usaha, akses modal, serta pendampingan berkelanjutan. Dengan intervensi yang tepat, masyarakat yang selama ini terjebak dalam rantai ekonomi subsisten dapat diarahkan menjadi pelaku ekonomi yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.

5. Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Infrastruktur Umum

a. Kondisi Fisik Perumahan

Kondisi kelas atas Kalurahan Triwidadi mampu membangun rumah untuk satu keluarga, meskipun bentuk dan jenis bangunan bervariasi tergantung pada tingkat keuangan, ada yang permanen dan ada yang semi permanen. Sebagian besar penduduk Kalurahan Triwidadi tinggal dalam satu rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga, karena orang tua yang suda lanjut usia tinggal bersama keluarga anaknya atau sebaliknya keluarga anak tinggal mengindung di rumah orang tua mereka. Kondisi pemukiman di Kalurahan Triwidadi hamper sepenuhnya layak dihuni dan memenuhi persyaratan konstruksi bangunan tempat tinggal. Namun, karena kondisi ekonomi tetap berada di garis kemiskinan, beberapa keluarga masih tinggal di rumah tinggal yang tidak layak huni.

b. Kondisi Jalan

Jalan Nasional Lintas Tengah (Jl. Wates) dan Jalan Nasional Lintas Selatan (Jl. Srandonan) menhubungkan Kalurahan Triwidadi dengan beberapa jalan kabupaten. Jalan-jalan ini menghubungkan wilayah-wilayah di dalam desa dengan wilayah Kalurahan atau Kapanewon yang berbatasan dengannya. Jalan-jalan di Kalurahan Triwidadi umumnya dalam kondisi baik, dengan jalan lingkungan di padukuhan dibangun dengan aspal dan corblok. Walaupun beberapa jalan sudah rusak, terutama di daerah perbukitan, karena kontur tanah yang tidak rata dan kurangnya perawatan, namun kondisinya masih layak untuk perjalanan warga.

c. Kondisi Jalan Drainase

Di Kalurahan Triwidadi, banyak jaringan drainase yang tidak memadai atau bahkan belum dibangun. Akibatnya, apabila terjadi hujan lebat, akan terjadi genangan air yang akan memakan waktu lama untuk meresap dan kering. Jikapun ada saluran drainase, itulah hanya saluran kecil yang tidak diatur dan tidak dirawat.

d. Kondisi Jaringan Listrik

Jaringan Listrik di Kalurahan Triwidadi hampir memenuhi seluruh wilayah melalui jaringan PLN, yang telah mencapai wilayah padukuhan. Jadi, semua orang menggunakan Listrik untuk penerangan, kebutuhan rumah tangga, dan kegiatan produktif.

e. Fasilitas Umum

Tabel 7. Jumlah Sarana Prasarana Umum

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Olaraga	30
2	Kesenian/Budaya	3
3	Sumur Desa	2
4	Balai Pertemuan	2
5	Pasar Desa	1

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Menurut tabel di atas sarana prasarana umum yang digunakan oleh masyarakat Triwidadi sangat memadai dan dalam kondisi baik.

Dari data di atas Kelurahan Triwidadi memiliki sejumlah sarana dan prasarana umum yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdasarkan data monografi desa

semester II tahun 2020, terdapat 30 sarana olahraga yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat Triwidadi memiliki akses yang cukup baik terhadap fasilitas olahraga, yang tidak hanya berfungsi untuk menunjang kesehatan fisik, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan kegiatan pemuda di tingkat komunitas. Selain itu, tersedia 3 sarana kesenian dan budaya yang mencerminkan perhatian terhadap pelestarian tradisi dan nilai-nilai lokal. Keberadaan fasilitas ini penting untuk mendukung identitas budaya masyarakat serta menjadi ruang bagi ekspresi seni dan kegiatan sosial yang berbasis kearifan lokal.

Untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, terdapat 2 sumur desa yang berfungsi sebagai sumber air bersih bagi warga. Meskipun jumlahnya terbatas, sumur desa tetap menjadi bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan air bersih modern. Dari segi kelembagaan sosial dan kegiatan pemerintahan, Kelurahan Triwidadi memiliki 2 balai pertemuan, yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan warga, musyawarah desa, pelatihan, hingga pertemuan organisasi kemasyarakatan. Balai pertemuan ini menjadi ruang penting dalam mendukung tata kelola desa yang partisipatif.

Sementara itu, keberadaan 1 pasar desa menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut peneliti, meskipun hanya satu, pasar ini memegang peranan vital dalam mendistribusikan hasil produksi lokal, mendukung kegiatan UMKM, dan mempertemukan penjual serta pembeli

dari berbagai lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun Kelurahan Triwidadi telah memiliki beberapa sarana dan prasarana penting, pengembangannya masih perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Pemerintah desa diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada serta menambah infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat secara merata.

f. Fasilitas Pendidikan

Tabel 8. Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	16
2	TK	7
3	SD	5
4	SLTP	1
5	SLTA	1
6	Perpustakaan Desa	1

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Kelurahan Triwidadi menunjukkan komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan berbagai fasilitas pendidikan yang tersebar di wilayahnya. Berdasarkan data monografi desa semester II tahun 2020, tercatat terdapat 16 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 7 Taman Kanak-Kanak (TK). Jumlah ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sejak dini cukup tinggi, serta adanya upaya dari pemerintah

desa dan masyarakat dalam memfasilitasi tahap awal pendidikan anak-anak.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, tersedia 5 Sekolah Dasar (SD) yang menjadi fondasi utama pendidikan formal anak-anak di Triwidadi. Selanjutnya, terdapat 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yang masing-masing melayani jenjang pendidikan menengah pertama dan atas. Jumlah yang terbatas untuk SLTP dan SLTA menunjukkan adanya keterbatasan akses pendidikan lanjutan dalam wilayah desa, sehingga memungkinkan sebagian siswa harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain lembaga pendidikan formal, terdapat pula 1 perpustakaan desa yang berfungsi sebagai pusat literasi dan pembelajaran masyarakat. Keberadaan perpustakaan ini penting untuk menunjang peningkatan budaya baca, memperluas wawasan, serta menjadi sarana pembelajaran non-formal bagi masyarakat berbagai usia.

Secara umum, ketersediaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Triwidadi cukup memadai untuk jenjang pendidikan usia dini dan dasar, namun masih perlu penguatan pada jenjang menengah dan sarana penunjang lainnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa agar pemerataan pendidikan dapat terus ditingkatkan, baik melalui pembangunan unit sekolah baru, peningkatan kualitas guru dan sarana, maupun kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Upaya ini sangat penting

dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang nantinya berdampak langsung pada kemajuan ekonomi dan sosial desa.

g. Fasilitas Kesehatan

Tabel 9. Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	-
2	Puskesdes	1
3	UKBM (Posyandu/Polindes)	22

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, data Monografi Desa Semester II Tahun 2020, terdapat tiga jenis fasilitas kesehatan yang tercatat di desa, dengan total (23) unit fasilitas kesehatan. Dari ketiga jenis tersebut, Puskesmas tidak tersedia di desa ini, yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan tingkat dasar belum sepenuhnya terfasilitasi oleh lembaga resmi milik pemerintah di tingkat kecamatan. Ketiadaan Puskesmas menjadi catatan penting dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar yang lebih komprehensif, seperti pemeriksaan dokter umum, imunisasi lengkap, dan penanganan penyakit menular.

Namun demikian, desa telah memiliki (1) unit Puskesdes (Puskesmas Desa) yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan sederhana, biasanya dikelola oleh bidan desa atau tenaga medis terbatas. Meskipun cakupannya tidak seluas Puskesmas, keberadaan Puskesdes cukup penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar seperti pertolongan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, dan pelayanan kesehatan

anak. Yang paling dominan adalah keberadaan 22 unit UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) seperti Posyandu dan Polindes, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan warganya. Posyandu sangat vital dalam layanan preventif, seperti imunisasi balita, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyuluhan gizi dan kesehatan ibu-anak.

h. Fasilitas Peribadahan

Tabel 10. Jumlah Fasilitas Peribadahan

No	Jenis Fasilitas Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	31
2	Mushola	20
3	Gereja	1

Sumber: Monografi Desa Semester II, 2020

Berdasarkan data Monografi Desa Semester II Tahun 2020, desa ini memiliki total (52) unit fasilitas peribadahan, yang terdiri atas 31 masjid, 20 mushola, dan 1 gereja. Dominasi jumlah masjid dan mushola menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa beragama Islam, yang juga selaras dengan data sebelumnya mengenai sebaran penduduk berdasarkan agama. Keberadaan 31 masjid menggambarkan bahwa kegiatan ibadah berjamaah seperti salat Jumat, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya dapat terfasilitasi dengan baik di berbagai dusun atau lingkungan dalam desa.

Sementara itu, 20 mushola berfungsi sebagai tempat ibadah harian yang biasanya digunakan untuk salat lima waktu, pengajian rutin, serta

kegiatan keagamaan skala kecil. Keberadaan mushola juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup dekat terhadap sarana ibadah, yang menjadi indikator kuatnya nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial desa. Selain itu, terdapat 1 gereja yang menunjukkan keberadaan minoritas umat Kristen di desa ini. Meskipun jumlahnya tidak besar, keberadaan fasilitas ibadah tersebut mencerminkan bahwa desa tetap memberi ruang bagi keragaman keyakinan dan toleransi antarumat beragama.

i. Fasilitas Perdagangan dan Ekonomi

Fasilitas perekonomian dan perdagangan yang ada di Kalurahan Triwidadi antara lain adalah Pasar Desa “Sudimoro”, tokoh, kios, tempat wisata dan lain-lain yang ada di wilayah Triwidadi sebagai sarana perekonomian dan perdagangan.

j. Penyelenggaraan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan

Untuk penduduk Kalurahan Triwidadi menggunakan sumur-sumur di sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka setiap hari. Sehingga, Ketika musim kemarau memasuki, wilayah perbukitan sering mengalami kesulitan karena debit sumur air berkurang atau bahkan menjadi kering. Karena infrastruktur yang masih terbatas, layanan air bersih PDAM belum dapat mencapai seluruh wilayah Triwidadi.

Jaringan sanitasi juga masih sederhana, tetapi sudah mengikuti dan memenuhi peraturan serta standar pembangunan sanitasi yang direkomendasikan pemerintah. Selain itu pengelolahan sampah dan

limbah rumah tangga masih sangat sederhana dan terlihat seperti hanya membuang sampah melalui lubang galian tanah.

k. Ruang Terbuka Hijau

Karena sebagian tanah desa digunakan untuk pertanian, wilayah Kalurahan Triwidadi belum memiliki infrastruktur ruang terbuka hijau. Saat ini, ruang terbuka hijau dapat digunakan sebagai lapangan olaraga atau tanah lapang yang dapat digunakan untuk kegiatan olaraga dan aktifitas umum lainnya. Jadi, secara tidak langsung peruntukannya juga terganggu, dan itu tidak dapat dianggap sebagai ruang terbuka hijau.

6. Profil UMKM Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul

Kalurahan Triwidadi merupakan salah satu wilayah di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, yang memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Triwidadi tersebar di berbagai padukuhan dan mencerminkan kreativitas serta kearifan lokal masyarakat dalam mengolah sumber daya yang ada menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Salah satu sektor unggulan yang menjadi identitas UMKM Triwidadi adalah kerajinan tangan. Produk kerajinan yang dihasilkan meliputi berbagai bentuk hasil olahan dari bahan alami dan daur ulang, seperti anyaman bambu, produk kayu, souvenir khas desa, dan barang-barang dekoratif lainnya. Kerajinan ini tidak hanya mencerminkan budaya

lokal, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi pelaku UMKM, khususnya ibu rumah tangga dan pemuda desa.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Triwidadi sangat penting dalam mendorong eksistensi UMKM lokal. LPMK aktif melakukan identifikasi, promosi, dan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan penguatan kapasitas. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan fasilitasi, LPMK menjadi motor penggerak utama dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya dan mandiri.

Selain LPMK, dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan UMKM di wilayah Triwidadi. Bentuk dukungan tersebut antara lain pelatihan kewirausahaan, bantuan alat produksi, serta promosi produk melalui event pameran dan expo UMKM baik di tingkat lokal maupun regional.

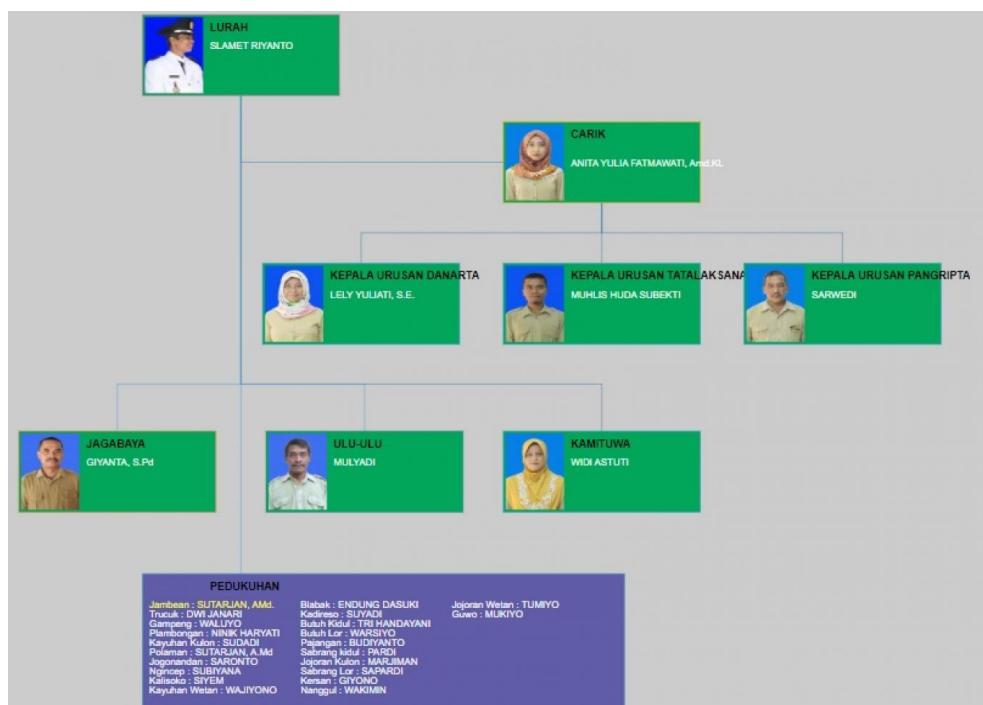
Selain sektor kerajinan, potensi produk unggulan lain juga mulai bermunculan dan berkembang, seperti produk olahan makanan tradisional, kuliner lokal, minuman herbal, serta produk pertanian organik. Produk-produk ini masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi kualitas, branding, maupun akses pasar. Namun, beberapa di antaranya masih menghadapi keterbatasan dalam hal promosi dan pemasaran, sehingga belum banyak dikenal oleh pasar luar.

Dengan potensi yang ada, UMKM di Kalurahan Triwidadi terus didorong untuk menjadi pilar ekonomi lokal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, pelaku usaha, lembaga pendamping, dan pihak eksternal lainnya untuk memastikan UMKM di Triwidadi dapat tumbuh lebih inklusif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan ekonomi digital saat ini.

7. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 134 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan dengan Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi



Pemerintahan Kalurahan Triwidadi pada tahun 2024 dipimpin oleh Lurah Slamet Riyanto, yang memegang peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta menyelaraskan pembangunan di berbagai sektor. Dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan teknis pemerintahan, beliau dibantu oleh aparatur kalurahan yang terbagi dalam beberapa posisi strategis.

Jabatan Carik atau sekretaris desa dipercayakan kepada Anita Yulia Fatmawati, Amd, yang berperan dalam mengelola tata administrasi pemerintahan kalurahan secara menyeluruh. Untuk urusan ketentraman dan ketertiban, posisi Kasi Jagabaya dipegang oleh Guyanta, S.Pd, sedangkan urusan sosial kemasyarakatan ditangani oleh Kasi Kamituwa, yaitu Widi Astuti. Urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup dijalankan oleh Kasi Ulu-Ulu, Mulyadi. Dalam struktur keuangan dan perencanaan, Kaur Danarta yaitu Lely Yuliyanti, SE, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, sementara Kaur Pangripta, Sarwedi, mengelola perencanaan pembangunan desa. Tugas-tugas administrasi umum dan tata usaha dilaksanakan oleh Kaur Tata Laksana, Muhlis Huda Subekti.

Struktur pemerintahan kalurahan juga didukung oleh peran Dukuh di masing-masing pedukuhan, yang menjadi ujung tombak dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat. Tercatat ada 22 pedukuhan, masing-masing dipimpin oleh dukuh sebagai berikut:

Susunan Pamong Kalurahan Tahun 2024:

1. Lurah : Slamet Riyanto

2. Carik : Anita Yulia Fatmawati, Amd
3. Kasi Jagabaya : Giyanta, S.Pd
4. Kasi Kamituwa : Widi Astuti
5. Kasi Ulu-Ulu : Mulyadi
6. Kaur Danarta : Lely Yuliyanti, SE
7. Kaur Pangripta : Sarwedi
8. Kaur Tata Laksana : Muhlis Huda Subekti
9. Dukuh :
 - a) Guwo : Mukiyono
 - b) Gampeng : Waluyo
 - c) Jojoran Kulon : Marjiman
 - d) Jojoran Wetan : Tumiyo
 - e) Blabak : Endung Dasuki
 - f) Kadireso : Suyadi
 - g) Sabrang Lor : Sapardi
 - h) Sabrang Kidul : Pardi
 - i) Nanggul : Wakimin
 - j) Kersan : Giyono
 - k) Pajangan : Budiyanto
 - l) Butuh Lor : Warsiyo
 - m) Butuh Kidul : Tri Handayani
 - n) Kayuhan Kulon : Sudadi
 - o) Kayuhan Wetan : Wajiyono

- p) Polaman : Sutarjan, Amd
- q) Jambean : Hendi
- r) Ngincep : Subiyana
- s) Joganandan : Saronto
- t) Kalisoko : Siyem
- u) Pj. Plambongan : Sarwedi
- v) Trucuk : Dwi Janari

Dengan susunan pamong kalurahan yang lengkap dan terstruktur ini, Kalurahan Triwidadi memiliki potensi yang besar untuk menjalankan roda pemerintahan desa secara optimal, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, serta membangun komunikasi efektif antara pemerintahan dan warga. Kolaborasi antara pamong dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

BAB III

PEMBAHASAN

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. Arah Tujuan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan UMKM

Pemerintah Kalurahan Triwidadi memiliki komitmen untuk menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan potensi sumber daya yang ada. Pemberdayaan UMKM bukan sekadar program temporer, melainkan strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan utama dari strategi ini adalah mengangkat potensi lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan terhadap sektor informal yang tak terarah, serta menciptakan ruang partisipatif bagi kelompok rentan seperti perempuan dan generasi muda. Pendekatan ini dirancang agar mampu menciptakan dampak ekonomi langsung yang berkelanjutan di tingkat desa.

Wawancara bersama Slamet Riyanto, Lurah Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Untuk strategi pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kalurahan saat ini sudah mulai melakukan perencanaan lewat Kasi Ulu-ulunya dalam bentuk kegiatan pelatihan UMKM, baik dari peningkatan kualitas produk, pengemasan, maupun marketing.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi tidak lagi melihat Ulu-ulunya hanya sebagai seksi urusan irigasi

atau pertanian, tetapi turut berperan aktif dalam penguatan ekonomi desa. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemberdayaan UMKM tidak terpisah dari sistem kelembagaan desa, melainkan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. Pelatihan yang mencakup peningkatan kualitas produk hingga marketing menandakan adanya pemetaan terhadap kebutuhan riil UMKM.

Selain itu, pelibatan seksi teknis seperti Kasi Ulu-ulu menjadi bentuk konkret sinergi antar-perangkat desa dalam pemberdayaan ekonomi. Ini memperlihatkan adanya arah kebijakan desa yang menyeluruh, bukan hanya simbolik atau kegiatan seremonial. Dengan adanya pelatihan yang menyentuh aspek produksi dan distribusi, pemerintah desa mencoba mengatasi akar persoalan yang kerap dihadapi pelaku UMKM, yakni keterbatasan keterampilan teknis dan akses pasar.

Dalam wawancara bersama Anita Yulia, Carik Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Arah kebijakan kami jelas, yaitu menjadikan UMKM sebagai ujung tombak ekonomi desa. Kami menyadari bahwa tidak semua warga memiliki akses pekerjaan formal, sehingga usaha kecil dan rumahan menjadi sandaran ekonomi utama. Pemerintah desa hadir untuk menjembatani keterbatasan masyarakat, khususnya dalam aspek produksi, pemasaran, dan permodalan.”

Pernyataan ini mencerminkan adanya orientasi strategis Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam menjadikan UMKM bukan sekadar pelengkap program pembangunan, melainkan sebagai inti penggerak ekonomi lokal. Frasa “ujung tombak” menandakan bahwa UMKM diposisikan secara strategis dalam skema pembangunan desa. Ini

mengindikasikan adanya kesadaran bahwa penguatan ekonomi tidak cukup jika hanya bertumpu pada sektor pertanian atau pekerjaan formal, melainkan harus melibatkan dan mendorong ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil.

Dengan menyatakan bahwa “tidak semua warga memiliki akses pekerjaan formal, sehingga usaha kecil dan rumahan menjadi sandaran ekonomi utama.” Kalimat ini menunjukkan kepekaan pemerintah desa terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakatnya. Triwidadi, seperti banyak desa lainnya, memiliki struktur ekonomi yang informal, di mana banyak warga menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha mandiri. Pernyataan ini sekaligus menjadi argumen penting yang mendasari mengapa pemberdayaan UMKM harus menjadi prioritas, sebab ia menyentuh langsung kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perhatian kebijakan secara konkret.

Pemerintah desa juga menunjukkan peran sebagai fasilitator aktif, “menjembatani keterbatasan masyarakat, khususnya dalam aspek produksi, pemasaran, dan permodalan.” Ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai pelayan dan penggerak. Ketiga aspek yang disebut produksi, pemasaran, dan permodalan merupakan tantangan klasik bagi UMKM, sehingga dengan menyasar langsung titik-titik tersebut, pemerintah desa sedang membangun sistem pemberdayaan yang bersifat komprehensif. Artinya, intervensi tidak berhenti pada pelatihan teknis saja, tetapi

mencakup akses pasar dan dukungan finansial yang esensial bagi keberlanjutan usaha.

Dalam wawancara bersama Ariyanti sebagai pelaku UMKM menyampaikan bahwa:

“Dulu saya hanya menjual tikar pandan dan tas anyaman di rumah saja, paling ramai saat ada tamu atau acara. Tapi sejak ada pelatihan dari desa dan difasilitasi ikut pameran, saya mulai tahu bagaimana mengemas produk, cara menentukan harga, dan promosi lewat HP. Pemerintah desa juga bantu kami gabung kelompok supaya bisa produksi bareng dan saling bantu modal.”

“Saya merasa sekarang lebih percaya diri menjual produk, karena kami tidak jalan sendiri. Ada semacam dukungan terus-menerus dari desa. Bahkan kami juga pernah dikunjungi langsung oleh lurah waktu produksi, jadi kami merasa dianggap penting. Harapannya ke depan bantuan semacam ini bisa rutin, bukan hanya saat event saja.”

Pernyataan di atas memperlihatkan adanya dampak langsung dari strategi pemberdayaan pemerintah desa terhadap pelaku UMKM. Awalnya, usaha yang dijalankan bersifat pasif dan berskala rumah tangga, namun setelah mendapat dukungan dari desa, pelaku mulai aktif mengembangkan usaha secara lebih profesional. Fakta bahwa ia mulai memahami pengemasan, penentuan harga, dan promosi digital menunjukkan keberhasilan program pelatihan dan pendampingan yang tidak hanya menyasar pengetahuan teknis, tetapi juga keterampilan bisnis.

Selain itu, keterlibatan dalam kelompok usaha menjadi elemen penting dalam pemberdayaan. Kalimat “gabung kelompok supaya bisa produksi bareng dan saling bantu modal” mencerminkan pendekatan kolektif yang difasilitasi oleh desa. Hal ini penting karena salah satu kelemahan UMKM adalah keterbatasan modal dan skala produksi. Dengan

membentuk kelompok, pelaku usaha mendapat kekuatan kolektif baik dari segi bahan baku, distribusi, hingga pembiayaan. Peran desa sebagai fasilitator kelompok ini menunjukkan arah kebijakan yang inklusif dan memberdayakan komunitas.

Yang tak kalah penting, narasumber menyindir aspek psikologis berupa peningkatan rasa percaya diri dan keterhubungan langsung dengan pemerintah desa. Ketika pelaku UMKM merasa "dianggap penting", ini mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa. Penguatan kapasitas bukan hanya soal pelatihan teknis, tetapi juga soal membangun mentalitas wirausaha dan rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Harapan narasumber agar bantuan bersifat rutin menandakan bahwa keberlanjutan program menjadi kunci utama untuk menjaga semangat pelaku UMKM.

B. Proses evaluasi dan pembelajaran strategi UMKM di tingkat desa

Evaluasi terhadap strategi pemberdayaan UMKM dilakukan secara periodik melalui monitoring kegiatan, pendampingan lanjutan, dan penyesuaian kebijakan berbasis kebutuhan riil pelaku usaha. Pemerintah desa juga mulai menerapkan sistem pembelajaran yang memungkinkan hasil dari setiap program diolah untuk menjadi dasar pengembangan kebijakan berikutnya.

Dalam praktiknya, pendampingan tidak hanya berhenti pada pelatihan awal, tetapi berlanjut dalam bentuk monitoring dan coaching usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan dampak jangka

panjang dan mendorong transformasi dari usaha subsisten menuju usaha berbasis pasar dan teknologi.

wawancara bersama Anita Yulia, Carik Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Memang setelah pelatihan-pelatihan yang sudah kami lakukan, kami tidak langsung membiarkan tetapi kami terus mendampingi, memonitoring agar produk-produk dari pelaku UMKM bisa terus dikembangkan lewat pelatihan yang sudah didapatkan.”

Pernyataan di atas menandakan bahwa Pemerintah Desa Triwidadi menyadari pentingnya keberlanjutan dalam pemberdayaan. Pelatihan saja tidak cukup; diperlukan sistem pendampingan dan monitoring agar ilmu yang diberikan bisa benar-benar diimplementasikan. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam memastikan bahwa intervensi yang mereka lakukan tidak bersifat jangka pendek.

Monitoring juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas efektivitas program, dan menjadi bahan perbaikan strategi ke depan. Jika pelaku UMKM mendapatkan dampingan secara berkelanjutan, maka transformasi dari usaha tradisional menjadi usaha modern akan berjalan lebih mulus. Ini sekaligus memperlihatkan adanya kultur pembelajaran (*learning culture*) dalam sistem pemerintahan desa yang progresif dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam wawancara bersama Slamet Riyanto, Lurah Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Setiap selesai program pelatihan atau event UMKM, kami tidak langsung berhenti. Biasanya kami lakukan evaluasi bersama tim Desa Preneur dan perangkat desa lain. Kami diskusikan apa yang

berhasil, apa yang kurang, termasuk masukan dari peserta. Evaluasi ini penting supaya tahun berikutnya programnya bisa lebih tepat sasaran.”

“Kami juga turun langsung untuk melihat perkembangan usaha yang sudah dilatih. Kami catat UMKM mana yang berkembang, mana yang masih perlu dibina, dan apa kendalanya. Dari situ kami buat laporan dan itu jadi bahan untuk musrenbangkal. Harapannya, strategi pemberdayaan ini terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, bukan cuma formalitas program.”

Pernyataan Lurah menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi tidak menjalankan strategi pemberdayaan UMKM secara statis, melainkan melalui siklus yang dinamis: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dilakukan secara rutin dan partisipatif, melibatkan lembaga mitra seperti Desa Preneur serta masukan dari peserta pelatihan. Ini mencerminkan adanya pendekatan reflektif dalam kebijakan desa, yang tidak hanya mengeksekusi program, tetapi juga belajar dari implementasi sebelumnya untuk menyempurnakan strategi berikutnya.

Langkah turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan UMKM binaan menjadi bukti komitmen pimpinan desa dalam membangun komunikasi dua arah dengan pelaku usaha. Proses ini penting bukan hanya untuk mengukur hasil program, tetapi juga sebagai bentuk penguatan relasi antara pemerintah dan warga. Pemantauan lapangan ini juga memperkuat akuntabilitas, karena hasil dari evaluasi dijadikan dasar dalam perencanaan anggaran dan kebijakan tahun berikutnya, seperti yang disebut dalam konteks musrenbangkal (musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan).

Lebih jauh, lurah menegaskan bahwa strategi pemberdayaan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif atau formalitas pelaporan. Ini adalah pengakuan atas tantangan banyak program di desa yang hanya bersifat seremonial. Melalui evaluasi dan pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur, Pemerintah Desa Triwidadi menunjukkan bahwa mereka mengupayakan keberlanjutan dan relevansi dari setiap intervensi yang dilakukan. Pendekatan ini menjadi ciri pemerintahan desa yang progresif dan adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam wawancara bersama Suratman selaku Ketua Desa Preneur menyampaikan bahwa:

“Evaluasi kami lakukan setiap selesai kegiatan, baik pelatihan, expo, maupun pendampingan. Tim kami biasanya membuat laporan sederhana, lalu kami undang beberapa pelaku UMKM untuk sharing. Dari situ kami bisa tahu kendala apa yang mereka alami, apakah pelatihannya sudah sesuai, dan apa yang perlu diperbaiki.”

“Kami juga punya daftar UMKM yang kami dampingi. Dari situ bisa kelihatan siapa yang aktif, siapa yang belum berkembang. Itu jadi dasar kami menyusun program berikutnya. Misalnya kalau banyak yang belum bisa jualan online, maka tahun depan kami fokuskan ke digital marketing. Jadi kami selalu coba belajar dari kegiatan sebelumnya supaya tidak mengulang kesalahan yang sama.”

Wawancara dengan Ketua Desa Preneur mengungkap proses evaluasi yang dilakukan secara praktis namun berdampak. Evaluasi tidak hanya dalam bentuk administrasi pelaporan, tetapi juga dilakukan melalui forum diskusi langsung dengan pelaku UMKM. Metode ini memberi ruang refleksi bagi kedua belah pihak baik penyelenggara maupun peserta untuk menilai efektivitas program. Dengan melibatkan pelaku usaha

secara langsung, proses evaluasi menjadi lebih partisipatif dan menghasilkan masukan yang konkret.

Pendataan UMKM yang dilakukan oleh tim Desa Preneur juga menjadi instrumen penting dalam monitoring perkembangan usaha pasca-pelatihan. Dengan mengetahui siapa saja yang aktif dan siapa yang belum berkembang, tim memiliki data aktual yang bisa dijadikan acuan perbaikan strategi. Ini menunjukkan bahwa proses evaluasi tidak hanya mengukur hasil kegiatan, tetapi juga memetakan kebutuhan dan kesiapan pelaku UMKM. Strategi berbasis data ini menjadikan program-program Desa Preneur lebih tepat sasaran.

Pernyataan Suratman juga menunjukkan bahwa hasil evaluasi benar-benar digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ke depan. Contohnya, ketika banyak pelaku yang belum bisa menjangkau pasar digital, maka pelatihan digital marketing menjadi prioritas tahun berikutnya. Ini mencerminkan adanya pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan yakni lembaga tidak hanya bergerak reaktif, tetapi proaktif merancang strategi berdasarkan evaluasi. Siklus evaluasi dan pembelajaran inilah yang menjadi kunci agar pemberdayaan UMKM di desa tidak stagnan, melainkan berkembang sesuai kebutuhan zaman.

C. Kebijakan dan Arahan Strategis Desa dalam Pengembangan UMKM

Pemerintah Kalurahan Triwidadi menerapkan pendekatan strategis dalam bentuk kerja sama lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi program-program pemberdayaan. Kebijakan ini mencakup

dukungan anggaran, kerja sama dengan kabupaten dan provinsi, serta pelibatan lembaga lokal seperti Desa Preneur, Desa Prima, dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat kelembagaan desa, strategi ini diarahkan untuk tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat pemasaran, inovasi produk, dan jaringan usaha. Arahan strategis ini juga menunjukkan adanya transisi dari pendekatan top-down menjadi partisipatif dan kolaboratif.

Wawancara bersama Anita Yulia, Carik Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pemanfaatan lembaga lokal seperti Desa Preneur, Desa Prima, dan KWT. Pelatihan digital marketing dilakukan lewat kerja sama dengan kabupaten atau provinsi, dan UMKM diberikan ruang ikut event seperti Triwidadi Expo”.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Triwidadi telah menyusun kebijakan strategis yang berbasis kolaborasi. Pemanfaatan lembaga-lembaga lokal menjadi pendekatan yang adaptif karena lembaga-lembaga ini sudah melekat dan lebih dekat dengan masyarakat. Desa Preneur misalnya, mampu menjangkau pelaku usaha di level akar rumput dan menyediakan edukasi yang sesuai kebutuhan lokal. Sementara itu, KWT dan Desa Prima menyasar pemberdayaan berbasis gender dan komunitas.

Sinergi dengan instansi kabupaten dan provinsi juga menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan anggaran desa. Dengan

membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk tampil di ajang seperti Triwidadi Expo, pemerintah tidak hanya memberi panggung promosi, tetapi juga membuka jalur distribusi, relasi, dan validasi produk. Ini membuktikan bahwa strategi desa tidak berhenti pada pelatihan, melainkan berlanjut pada penguatan pasar dan ekosistem usaha.

Dalam wawancara bersama Slamet Riyanto, Lurah Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Kami di Kalurahan Triwidadi punya arah kebijakan yang cukup jelas untuk pengembangan UMKM. Selain program dari pemerintah pusat atau kabupaten, kami juga merancang program desa berbasis potensi lokal. Salah satu bentuknya, kami aktif bekerja sama dengan lembaga desa seperti Desa Preneur, KWT, dan PKK, supaya program pemberdayaan tidak top-down tapi partisipatif.”

“Kami juga punya kebijakan untuk membuka akses promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM. Salah satunya lewat kegiatan tahunan Triwidadi Expo. Itu bukan hanya ajang pamer produk, tapi juga cara kami menghubungkan UMKM lokal dengan pasar luar, termasuk calon pembeli dari luar desa. Selain itu, kami mulai mengintegrasikan pelatihan dengan penganggaran desa, jadi tidak tergantung dari luar.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi memiliki orientasi strategis yang terencana dalam pengembangan UMKM. Lurah menyebut bahwa program yang dijalankan tidak semata-mata mengikuti program dari atas (pusat atau kabupaten), tetapi juga dirancang sesuai potensi desa. Hal ini menunjukkan prinsip bottom-up planning, di mana perencanaan bersumber dari kebutuhan dan kekuatan lokal, bukan hanya dari intervensi eksternal. Inisiatif seperti melibatkan lembaga lokal (Desa Preneur, KWT, PKK) menunjukkan

bahwa kebijakan desa diarahkan secara kolaboratif dan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Arahan strategis lainnya terlihat dari kebijakan untuk memperluas akses pasar, terutama melalui ajang seperti Triwidadi Expo. Dalam konteks UMKM, promosi adalah salah satu hambatan utama, dan kegiatan seperti expo menjadi langkah konkret untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan konsumen yang lebih luas. Strategi ini juga memperlihatkan peran desa sebagai fasilitator, bukan hanya regulator. Dengan memberikan ruang eksposur, desa membantu membuka peluang bisnis, memperluas jejaring relasi, dan meningkatkan daya saing UMKM secara lebih profesional.

Poin penting lainnya adalah integrasi pelatihan dalam sistem penganggaran desa. Artinya, program pelatihan atau pendampingan UMKM tidak bergantung pada hibah atau bantuan instansi luar, tetapi sudah menjadi bagian dari prioritas penggunaan Dana Desa. Pendekatan ini sangat strategis karena menunjukkan keberlanjutan dan komitmen jangka panjang pemerintah desa dalam membangun ekosistem UMKM yang stabil. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran, kebijakan ini mampu memberi dampak yang lebih luas dan merata bagi masyarakat pelaku usaha.

Dalam wawancara bersama Suratman selaku Ketua Desa Preneur menyampaikan bahwa:

“Desa Preneur ini dibentuk oleh pemerintah kalurahan sebagai wadah pengembangan UMKM di Triwidadi, dan kami sudah

berjalan sejak 2022. Tugas kami membantu para pelaku UMKM, mulai dari pelatihan produksi, cara jualan online, sampai pendampingan kemasan dan izin usaha. Jadi memang kami ini kepanjangan tangan dari strategi desa yang ingin menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi.”

“Kami juga terlibat langsung dalam menyusun program pelatihan bersama pemerintah desa. Tidak hanya itu, kami ikut mendampingi peserta setelah pelatihan, termasuk bantu pemasaran. Dalam beberapa kasus, kami bahkan ikut membantu mencariak akses ke distributor atau platform digital seperti marketplace. Jadi peran kami tidak cuma koordinasi, tapi juga aksi lapangan.”

Wawancara dengan Ketua Desa Preneur mengungkap bahwa kelembagaan lokal memiliki peran sentral dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan UMKM secara teknis di lapangan. Suratman menjelaskan bahwa lembaga ini merupakan inisiatif dari pemerintah desa yang dijalankan secara profesional dan berkelanjutan. Dengan fungsi sebagai “kepanjangan tangan” dari pemerintah kalurahan, Desa Preneur bertugas menjabarkan strategi makro desa ke dalam kegiatan mikro yang bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM.

Penjelasan tentang tugas-tugas yang dijalankan mulai dari pelatihan produksi hingga pengurusan izin usaha menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Ini memperlihatkan keseriusan pemerintah desa dalam membangun ekosistem UMKM, di mana desa tidak hanya memberikan pelatihan satu kali, tetapi juga menciptakan struktur pendukung yang bekerja secara berkelanjutan. Desa Preneur menjadi model kelembagaan partisipatif yang mendorong sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pasar.

Pernyataan Suratman juga menegaskan bahwa Desa Preneur tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga operasional. Dengan ikut mendampingi pasca-pelatihan dan menjembatani pelaku usaha ke platform pemasaran digital, Desa Preneur memperluas dampak dari strategi pemberdayaan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga mitra seperti ini sangat vital dalam memastikan strategi kebijakan desa benar-benar sampai ke masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan.

Dalam wawancara bersama Ibu Purwanti sebagai Pelaku UMKM menyampaikan bahwa:

“Saya mulai ikut program Desa Preneur sejak awal 2023. Waktu itu usaha saya baru sebatas bikin keripik singkong buat dijual ke warung. Setelah ikut pelatihan dari Desa Preneur, saya mulai belajar cara membuat kemasan lebih bagus, bikin label, dan juga ditunjukkan cara daftar PIRT. Dulu saya kira itu semua ribet, tapi ternyata bisa dibantu.”

“Yang paling saya rasakan itu bukan cuma pelatihannya, tapi ada orang dari Desa Preneur yang bantu terus waktu saya bingung. Bahkan produk saya pernah dibawa ke Triwidadi Expo dan difoto untuk dipromosikan di Instagram UMKM. Saya merasa usaha saya sekarang lebih layak dijual ke luar, nggak cuma untuk tetangga sekitar.”

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana intervensi kebijakan melalui lembaga seperti Desa Preneur benar-benar memberi dampak nyata pada pelaku UMKM di tingkat akar rumput. Purwanti, sebagai pelaku usaha rumahan, menyatakan bahwa sebelumnya ia hanya menjalankan usahanya secara sederhana tanpa legalitas atau strategi pemasaran. Namun setelah terlibat dalam pembinaan, ia mulai melakukan transformasi usaha secara bertahap, baik dari sisi kemasan, perizinan, maupun branding. Hal

ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang terstruktur mampu mengubah persepsi pelaku usaha terhadap potensi produknya sendiri.

Penting dicatat bahwa yang dirasakan paling kuat oleh narasumber bukan hanya pengetahuan teknis dari pelatihan, tetapi pendampingan pasca-pelatihan yang dilakukan oleh tim Desa Preneur. Ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya bergantung pada materi pelatihan, melainkan juga pada konsistensi dukungan teknis dan moral dalam proses implementasi. Dengan adanya tim yang aktif membantu secara langsung, rasa percaya diri dan motivasi pelaku usaha ikut meningkat.

Keterlibatan pelaku dalam event seperti Triwidadi Expo serta promosi digital melalui kanal resmi desa juga memberi gambaran bahwa kebijakan desa tidak berhenti di ranah administratif, tetapi menjangkau strategi branding dan pemasaran digital. Pendekatan ini mencerminkan bahwa strategi desa tidak lagi bersifat konvensional, melainkan mulai adaptif terhadap tren pasar dan teknologi. Dengan demikian, kebijakan strategis pemerintah desa dan lembaga pendukung seperti Desa Preneur menjadi jembatan penting bagi pelaku UMKM untuk naik kelas secara nyata.

D. Bentuk Nyata Program dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM

Bentuk konkret dari strategi pemberdayaan ini terlihat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, pameran, pendampingan usaha, serta

pembentukan komunitas usaha. Pemerintah desa aktif memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan boga, pengolahan pangan lokal, dan digitalisasi usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan provinsi.

Kegiatan seperti Triwidadi Expo menjadi ajang penting untuk mempromosikan produk lokal, memperluas relasi bisnis, dan memperkuat branding UMKM desa. Selain itu, melalui program Desa Preneur, para pelaku usaha mendapat pendampingan langsung dalam meningkatkan kualitas produk dan mengelola usaha secara profesional.

Wawancara bersama Anita Yulia, Carik Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Untuk sekarang strategi pemerintah kalurahan membentuk yang namanya Desa Preneur untuk jadi wadah bagi para pelaku UMKM di Triwidadi. Sudah berjalan selama 3 tahun.”

Pembentukan Desa Preneur sebagai wadah resmi pengembangan UMKM menandai langkah strategis pemerintah desa dalam institusionalisasi pemberdayaan. Dengan keberadaan lembaga ini, pemberdayaan tidak lagi bersifat sporadis atau tergantung program, melainkan dikelola secara berkelanjutan. Fakta bahwa program ini telah berjalan selama tiga tahun menunjukkan komitmen jangka panjang serta adanya learning process yang terjadi selama pelaksanaan.

Desa Preneur juga menjadi kanal untuk integrasi berbagai program pelatihan, pendampingan, hingga inkubasi usaha. Dalam konteks pemberdayaan, ini merupakan bentuk penguatan kelembagaan lokal yang

krusial untuk menciptakan kemandirian UMKM. Dengan struktur yang lebih terorganisir, pelaku UMKM mendapatkan akses lebih luas terhadap pelatihan dan jaringan pemasaran, serta lebih siap menghadapi persaingan pasar.

Wawancara Ariyanti, pelaku UMKM menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya event seperti ini kami sebagai pelaku UMKM yang jujur sebenarnya masih kurang paham cara agar produk kami dikenal banyak orang, dan puji Tuhan event-event seperti ini sangat membantu kami untuk memperkenalkan produk dan mendapat relasi.”

Pernyataan Ariyanti memperlihatkan bahwa pelaku UMKM sangat terbantu dengan difasilitasinya event-event promosi oleh pemerintah desa. Event semacam ini menjadi momentum penting untuk membangun kepercayaan diri pelaku usaha lokal yang sebelumnya merasa tertinggal. Selain memamerkan produk, kegiatan ini membuka akses jejaring sosial dan profesional yang sangat berarti untuk pengembangan usaha.

Selain itu, pernyataan ini menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap aspek visibilitas UMKM. Banyak pelaku UMKM sebenarnya punya produk bagus, namun terkendala dalam memperkenalkannya kepada publik. Event seperti Triwidadi Expo menjadi sarana langsung untuk mendapat umpan balik dari konsumen, validasi pasar, hingga peluang kerja sama dengan pembeli, distributor, bahkan investor.

Dalam wawancara bersama Suratman selaku Ketua Desa Preneur menyampaikan bahwa:

“Program paling nyata yang kami jalankan adalah pelatihan rutin untuk pelaku UMKM. Kami sudah beberapa kali mengadakan pelatihan pengemasan, digital marketing, hingga pelatihan keuangan sederhana. Peserta biasanya dari masing-masing padukuhan, dan kami koordinasi dengan dukuh serta pemerintah desa supaya merata.”

“Selain pelatihan, kami juga rutin mengadakan pendampingan setelahnya. Ada yang kami bantu daftarkan PIRT, ada yang kami bantu bikin logo dan desain kemasan, bahkan ada yang kami sambungkan ke reseller dari luar. Salah satu kegiatan paling besar adalah Triwidadi Expo, di mana UMKM kami fasilitasi untuk tampil dan jualan langsung ke masyarakat luas.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Desa Preneur tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi antar pelaku UMKM, tetapi telah berkembang menjadi pelaksana teknis pemberdayaan di tingkat desa. Program pelatihan yang rutin dilaksanakan dan menyasar berbagai aspek usaha pengemasan, digital marketing, hingga pengelolaan keuangan mewakili bentuk konkret dari upaya peningkatan kapasitas SDM UMKM. Pendekatan ini penting karena pelatihan semacam itu menjadi fondasi untuk membawa UMKM dari sektor informal menuju arah yang lebih terorganisir dan profesional.

Yang membuat program ini menonjol adalah keberlanjutan melalui pendampingan lanjutan. Suratman menyebut bahwa pihaknya tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi juga membantu pelaku usaha mengurus perizinan (seperti PIRT), membuat logo, bahkan membuka akses distribusi melalui jaringan reseller. Ini menjadi bukti bahwa kegiatan pemberdayaan tidak bersifat simbolis atau seremonial, melainkan memiliki tahapan yang jelas dan outcome yang nyata. Dalam banyak kasus, inilah yang menjadi

pembeda antara program yang sekadar “program” dengan yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.

Selain itu, keberadaan event tahunan Triwidadi Expo menjadi bentuk promosi sekaligus validasi pasar bagi UMKM lokal. Event ini tidak hanya berfungsi untuk menjual produk, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan diri pelaku usaha, memperkenalkan brand lokal, dan memperluas jejaring pemasaran. Dengan fasilitasi aktif dari Desa Preneur, kegiatan-kegiatan ini menjelma menjadi strategi terpadu yang menghubungkan pelatihan, produksi, pemasaran, dan eksistensi UMKM dalam satu sistem pemberdayaan yang komprehensif dan terarah.

Dalam wawancara bersama Sudarwati selaku Pelaku UMKM, menyampaikan bahwa:

“Saya ikut pelatihan dari Desa Preneur tahun lalu tentang cara produksi higenis dan pengemasan. Waktu itu saya baru memulai usaha minuman jahe. Dulu cuma saya jual pakai plastik biasa dan tanpa label. Tapi setelah pelatihan, saya mulai pakai kemasan standing pouch dan bikin merek sendiri. Alhamdulillah kelihatan lebih menarik.”

“Setelah itu saya juga dibantu bikin Instagram oleh anak-anak dari Desa Preneur. Mereka bantu foto produk dan ajari cara posting. Bahkan produk saya pernah dipajang di Triwidadi Expo, dan sejak itu saya mulai dapat pesanan dari luar padukuhan. Saya merasa didampingi, nggak jalan sendiri.”

Pengalaman Ibu Sudarwati menjadi bukti nyata keberhasilan implementasi program pemberdayaan UMKM oleh Desa Preneur. Ia memulai usaha dari kondisi yang sangat sederhana tanpa kemasan yang layak, tanpa label produk, dan hanya menjual dalam lingkup lokal. Namun berkat pelatihan produksi higienis dan pengemasan, usaha yang awalnya

bersifat rumahan mulai menunjukkan transformasi ke arah usaha yang lebih profesional. Ini menunjukkan bahwa program pelatihan dari desa benar-benar menjawab kebutuhan dasar pelaku UMKM: dari aspek teknis produksi hingga estetika kemasan.

Lebih penting lagi, transformasi tidak hanya terjadi pada produk, tetapi juga pada cara pemasaran. Bantuan dari tim muda Desa Preneur untuk membuat akun media sosial dan mempromosikan produk secara digital membuka akses baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pelaku. Ini mencerminkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga partisipatif melibatkan generasi muda dan teknologi digital dalam mendukung pelaku usaha lokal. Dengan bantuan ini, pelaku UMKM seperti Ibu Purwanti dapat memperluas pasar dan mulai terhubung dengan konsumen luar desa.

Poin penting dalam wawancara ini adalah perasaan “didampingi” yang diungkapkan narasumber. Ini menjadi indikator penting dari keberhasilan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Ketika pelaku usaha merasa tidak sendirian, mereka cenderung lebih percaya diri untuk berkembang. Pendekatan yang dilakukan oleh Desa Preneur dari pelatihan hingga promosi membuktikan bahwa bentuk nyata program desa tidak hanya berupa kegiatan, tetapi juga sistem dukungan yang terus berjalan. Keberhasilan ini merefleksikan hubungan yang kuat antara kebijakan desa dan partisipasi warga dalam membangun kemandirian ekonomi.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi UMKM

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Triwidadi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM. Mayoritas warga bekerja di sektor informal, termasuk pertanian dan usaha rumahan. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang beragam, serta dominasi usia produktif, menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan UMKM.

Ketimpangan dalam akses teknologi, keterbatasan modal, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan serius dalam peningkatan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan UMKM diarahkan untuk menjawab kondisi sosial ekonomi ini melalui pelatihan praktis, pendampingan, dan kerja sama lintas sektor.

Wawancara bersama Slamet Riyanto, Lurah Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat punya produk, tapi masih dijual secara manual dan konvensional. Ini menjadi kelemahan pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi.”

Pernyataan ini menggambarkan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Triwidadi, yaitu minimnya inovasi dalam pemasaran produk. Produk sudah ada, bahkan banyak, tetapi belum dikembangkan secara maksimal untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perilaku pasar modern. Penjualan yang masih konvensional mempersempit jangkauan pasar dan membuat pelaku UMKM kesulitan bersaing di tengah persaingan digital saat ini.

Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki potensi produksi, mereka belum memiliki kecakapan digital maupun strategi branding. Pemerintah desa melalui pengamatan ini menyadari pentingnya transformasi dari UMKM tradisional menuju UMKM digital, sehingga intervensi kebijakan diarahkan ke arah literasi pemasaran, branding produk, dan pemanfaatan platform online.

Dalam wawancara bersama Anita Yulia, Carik Triwidadi menyampaikan bahwa:

“Kalau kita lihat, kondisi sosial ekonomi masyarakat Triwidadi itu sangat bervariasi. Sebagian masih menggantungkan hidup dari pertanian, tapi generasi mudanya cenderung enggan melanjutkan. Banyak yang lebih tertarik kerja di kota atau sektor informal. Maka UMKM jadi ruang tengah antara tetap tinggal di desa tapi punya penghasilan sendiri.”

“Masalahnya adalah tidak semua masyarakat punya pengalaman usaha. Ada juga yang usahanya hanya sambilan, bukan orientasi utama. Maka dari itu, strategi kami adalah mengarahkan program pelatihan bukan cuma soal teknis usaha, tapi juga soal cara berpikir bagaimana mengubah pola pikir dari sekadar ‘julan’ menjadi ‘berusaha’.”

Pernyataan Carik Kalurahan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Triwidadi menyadari adanya pergeseran orientasi ekonomi masyarakat. Generasi muda yang enggan meneruskan sektor pertanian menciptakan kebutuhan akan alternatif ekonomi yang tetap berbasis desa. UMKM dalam hal ini menjadi semacam “penjembatan” antara keinginan untuk tetap tinggal di desa dengan kebutuhan untuk memiliki penghasilan yang mandiri. Perspektif ini penting karena menyadarkan bahwa pemberdayaan UMKM juga punya dimensi sosial: mencegah urbanisasi berlebih dan mempertahankan produktivitas di desa.

Lebih lanjut, Carik menekankan bahwa tidak semua pelaku usaha memiliki landasan berpikir atau pengalaman wirausaha. Banyak UMKM di Triwidadi yang bersifat sambilan, insidental, atau dijalankan tanpa visi jangka panjang. Oleh karena itu, strategi yang tepat bukan hanya pada pelatihan teknis (seperti membuat produk atau pengemasan), tetapi pada transformasi pola pikir (mindset). Pemerintah desa secara eksplisit memposisikan pendidikan kewirausahaan sebagai fondasi penting dari program pemberdayaan.

Strategi yang diarahkan pada pembentukan pola pikir ini menjadi pendekatan yang progresif, karena menyentuh akar masalah, bukan hanya gejalanya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Triwidadi mulai bergerak dari sekadar “memberi bantuan” ke tahap “membangun sistem berpikir masyarakat”. Dengan mengubah cara pandang terhadap usaha, pelaku UMKM diharapkan memiliki semangat, keberanian, dan kemandirian yang lebih besar dalam mengelola dan mengembangkan usahanya di tengah tantangan ekonomi desa.

Dalam wawancara bersama Suratman selaku Ketua Desa Preneur menyampaikan bahwa:

“Kondisi ekonomi masyarakat di sini sangat beragam. Ada yang memang sudah lama punya usaha, tapi banyak juga yang hanya ikut-ikutan atau mulai karena keadaan, misalnya karena kena PHK atau karena tidak bisa kerja di luar kota. Jadi UMKM ini sebenarnya lahir dari keterpaksaan, tapi justru dari situ lah peluangnya muncul.”

“Masalah utama yang saya lihat adalah masih rendahnya keterampilan usaha dan keterbatasan alat produksi. Masyarakat sebenarnya semangat, cuma belum tahu caranya mengelola usaha

dengan baik. Apalagi yang dari kalangan menengah ke bawah, mereka perlu banyak pendampingan, bukan hanya bantuan modal.”

Pernyataan di atas memperlihatkan dinamika sosial ekonomi masyarakat Triwidadi yang berkontribusi terhadap lahirnya UMKM. Ia menekankan bahwa sebagian besar UMKM tumbuh bukan karena kesiapan usaha, tetapi sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau sulitnya akses ke sektor formal. Ini mengindikasikan bahwa UMKM menjadi instrumen survival ekonomi masyarakat, dan bukan sekadar pilihan bisnis yang strategis. Hal ini penting untuk dipahami agar strategi pemberdayaan tidak hanya menekankan pada pertumbuhan, tetapi juga pada penguatan fondasi dasar pelaku usaha.

Kondisi ini menciptakan segmentasi pelaku UMKM, antara mereka yang sudah mapan dan mereka yang baru memulai dari keterbatasan. Tantangan utamanya terletak pada minimnya keterampilan kewirausahaan, seperti manajemen keuangan, produksi, dan pemasaran. Dalam konteks inilah, program pemerintah desa harus dirancang dengan pendekatan berjenjang, yakni membedakan antara pelaku usaha pemula dan yang sudah berkembang, agar intervensi tepat sasaran. Tanpa hal ini, strategi bisa gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Penting pula dicatat bahwa narasumber menekankan kebutuhan akan pendampingan, bukan hanya bantuan modal. Ini sejalan dengan banyak literatur yang menyebut bahwa dalam konteks desa, aspek non-material seperti pendampingan, pembinaan, dan edukasi seringkali lebih

penting daripada bantuan finansial semata. Artinya, Pemerintah Desa Triwidadi harus mengedepankan pembangunan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan hanya intervensi sesaat. Pendampingan juga berfungsi membentuk mentalitas usaha dan membangun kepercayaan diri pelaku UMKM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kalurahan Triwidadi memiliki arah kebijakan yang jelas dalam menjadikan UMKM sebagai ujung tombak penguatan ekonomi lokal. Strategi ini tidak hanya simbolik, tetapi menyatu dalam sistem kelembagaan desa dan melibatkan perangkat desa lintas bidang secara aktif.

Struktur sosial-ekonomi masyarakat Triwidadi yang didominasi oleh sektor informal, pendidikan beragam, dan minimnya keterampilan usaha menjadi latar belakang penting dalam merancang strategi UMKM. UMKM hadir sebagai solusi untuk menahan laju urbanisasi dan memperkuat ekonomi desa.

Kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan secara kolaboratif dengan memanfaatkan kelembagaan lokal seperti Desa Preneur, KWT, dan PKK. Pemerintah desa juga mulai mengintegrasikan pelatihan ke dalam penganggaran desa, menunjukkan komitmen terhadap program yang berkelanjutan.

Program nyata yang telah berjalan mencakup pelatihan usaha, pendampingan langsung, fasilitasi izin usaha, hingga promosi melalui event seperti Triwidadi Expo. Ini menunjukkan bahwa strategi desa telah menyentuh seluruh aspek penting dari ekosistem UMKM.

B. Saran

1. Perkuat sistem pendampingan berjenjang

Pemerintah desa dapat membedakan strategi antara UMKM pemula dan yang sudah berkembang agar intervensi lebih tepat sasaran.
2. Tingkatkan akses pembiayaan mikro yang fleksibel

Kolaborasi dengan koperasi desa atau bank BUMDes dapat membantu UMKM yang masih kesulitan modal usaha.
3. Dorong digitalisasi UMKM secara massif

Pelatihan dan pendampingan digital marketing perlu ditingkatkan dengan melibatkan pemuda desa sebagai mentor digital.
4. Bangun sistem database UMKM yang terintegrasi

Pendataan yang sistematis akan memudahkan evaluasi, penganggaran, dan penentuan prioritas program di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Pipit Fitriani. 2022. *Strategi Pemasaran Dan Literasi Syariah Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM Masyarakat*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 2. Institut Agama Islam Ponorogo.
- Ajeng Wulansari, dkk. 2021. *Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 7 No. 1.
- Amri, Sofyan. 2014. *Permasalahan UMKM di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bachtiar, dkk. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiarto, H. 2015. *Klasifikasi Industri Berdasarkan Tenaga Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Christian. 2020. *Public Strategy & Governance*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.
- Gustiman, R. 2021. *Strategi dan Kebijakan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Maharani, Salwa Dwi, dkk. 2024. *Peran Penguatan Oleh Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Desa Banjarsari, Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 11 No. 2.
- Maulidiana. 2018. *Konsep Strategi dalam Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rival Pahrijal, dkk. 2024. *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 3 No. 4.

- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sharif, Ahmad Hazas, dkk. 2023. *Pemberdayaan UMKM Gula Aren Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 4.
- Sobirin, M. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2004. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro Eko. 2002. *Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjahjani Murdjaningsih, dkk. 2023. *Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2.
- Yuni Ermawati & Pujiyanto. 2021. *Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis PKK di Desa Wisata Sekapuk Kabupaten Gresik*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Carik



Wawancara dengan Pelaku UMKM



Wawancara dengan Bapak Lurah



Wawancara dengan Ketua Desa Prenuer



Wawancara bersama ibu Purwanti



Wawancara bersama Ibu Ariyanti



Pelatihan Digitalisasi Desa Prima didampingi Desa Prenuer



Lima Ruko Bantuan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dana Keistimewaan
Pemda DIY